# LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

## 2021

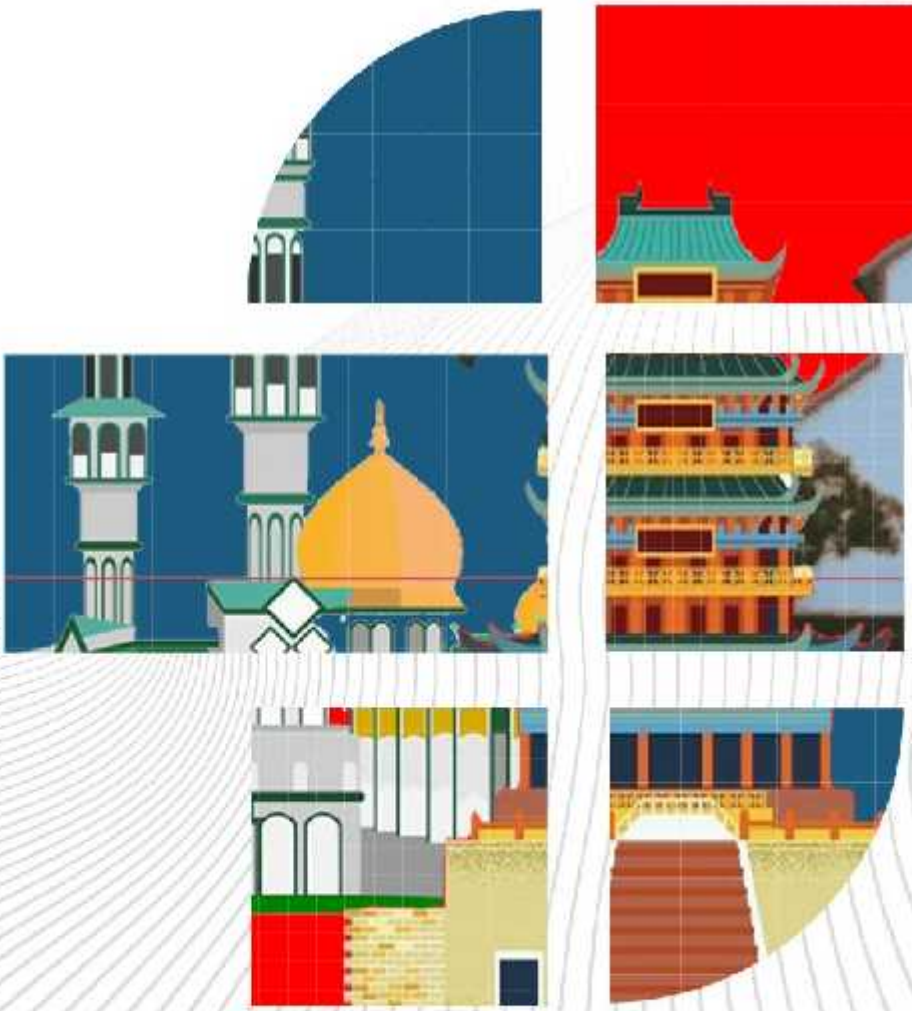

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

SINGKAWANG HEBAT!

# KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2021 dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Laporan ini disusun sebagai salah satu instrumen dalam upaya untuk mewujudkan percepatan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang dan sebagai media pertanggungjawaban serta sarana informasi Pemerintah Kota Singkawang dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pada umumnya.

Secara garis besar Laporan Kinerja Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2020 ini berisi informasi tentang perencanaan dan capaian kinerja tahun pertama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Singkawang tahun 2018-2022, baik keberhasilan maupun kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis juga memuat aspek keuangan yang secara langsung berkaitan antara dana Pemerintah yang dibelanjakan dengan hasil atau manfaat yang diterima masyarakat.

Tahun 2021 ini merupakan tahun keempat masa tugas Wali Kota Singkawang periode tahun 2018-2022. Masih banyak hal yang perlu dilakukan dalam penyelenggaraan pemerintahan secara umum dan dalam hal pelayanan publik pada khususnya. Namun demikian masih ada juga hal-hal yang belum terwujud sesuai dengan keinginan masyarakat. Hal ini menjadi evaluasi bagi Pemerintah Kota Singkawang untuk bekerja lebih keras lagi pada tahun berikutnya.

Besar harapan kami bahwa penyajian Laporan Kinerja Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2021 ini dapat menjadi salah satu pemacu dalam memperbaiki kinerja ke depan secara lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek-aspek perencanaan, pengorganisasian, maupun koordinasi pelaksanaannya. Kami menyadari bahwa laporan ini masih belum sempurna. Dengan demikian Pemerintah Kota Singkawang sangat mengharapkan adanya

kritik dan saran yang membangun guna perbaikan penyusunan laporan di tahun mendatang.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2020 ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan baik sebagai informasi maupun evaluasi kinerja Pemerintah Kota Singkawang.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu mengiringi segala upaya kita dalam mengabdi bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Atas keberhasilan Pemerintah Kota Singkawang

Singkawang, 30 Maret 2022

WALI KOTA SINGKAWANG,

**TJHAI CHUI MIE, S.E, M.H.**

# DAFTAR ISI


KATA PENGANTAR . . . . . i

DAFTAR ISI . . . . . iii

BAB I : PENDAHULUAN . . . . . 1

A. GAMBARAN UMUM . . . . . 1

1. Pendahuluan . . . . . 1

2. Susunan Organisasi . . . . . 6

3. Tugas dan Fungsi . . . . . 8

4. Sumber Daya Aparatur . . . . . 12

5. Sumber Daya Keuangan . . . . . 13

B. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED) . . . 14

BAB II : PERENCANAAN KINERJA . . . . . 17

A. RENCANA STRATEGIS . . . . . 17

1. Visi . . . . . 18

2. Misi . . . . . 18

3. Tujuan dan Sasaran Strategis . . . . . 18

B. PRIORITAS DAERAH . . . . . 24

C. PERJANJIAN KINERJA . . . . . 28

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA . . . . . 31

A. CAPAIAN KINERJA PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG . . . . . 31

B. REALISASI ANGGARAN . . . . . 118

BAB IV : PENUTUP . . . . . 122

LAMPIRAN

# BAB I
# PENDAHULUAN

## A. GAMBARAN UMUM

### 1. Pendahuluan

Penyelenggaraan pemerintahan yang *good governance* tidaklah dapat berjalan dengan sendirinya tanpa komitmen yang kuat dari pemerintah daerah, tetapi melibatkan *private sector* dan masyarakat dalam mengawal dan menggiring pemerintahan kearah berlangsungnya *good governance* terutama penyelenggaraan penyediaan *public good and service*. Koordinasi yang baik, integritas dan profesional serta etos kerja dan moral yang tinggi diharapkan mampu menghasilkan *output* penyelenggaraan pemerintah yang efisien dan efektif. Mekanisme juga diperlukan dalam hal meregulasi akuntabilitas pada setiap instansi pemerintah pada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang, dan memperkuat peran serta legislatif baik dalam perencanaan, penganggaran, pengawasan, regulasi serta kerjasama pengambilan kebijakan strategis.

Sebagai bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan penyelenggaraan pemerintahan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan secara periodik, maka setiap pemerintahan wajib berakuntabilitas. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), menyatakan "Berdasarkan Laporan Kinerja tahunan SKPD sebagaimana Pasal 21, Bupati/Wali Kota menyusun Laporan Kinerja tahunan pemerintah kabupaten/kota dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir".

Laporan Kinerja disusun dalam rangka perwujudan akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta

pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada instansi pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas kinerja yang terukur dan memadai. Sebagai alat kendali, penilai kinerja dan pendorong terwujudnya *good governance*, maka Laporan Kinerja dalam prespektif yang lebih luas berfungsi sebagai media informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja pemerintah yang telah dan seharusnya tercapai.

Dengan demikian, Laporan Kinerja Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2021 ini juga merupakan laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintahan oleh Wali Kota Singkawang kepada Presiden Republik Indonesia yang disusun dan dikembangkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Adapun dasar penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2021 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang;

b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

d. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614;

g. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;

h. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

i. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

j. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

k. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Teknis Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

m. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Singkawang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 14);

n. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2012 Nomor 3);

o. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51);

p. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2018

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Singkawang Tahun 2018–2022;

q. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2020 Nomor 10);

r. Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 19 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2020 Nomor 20);

s. Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 72 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Singkawang Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2020 Nomor 73).

t. Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 72 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Singkawang Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 23).

u. Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 43 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Nomor 72 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Singkawang Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 43).

v. Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 93 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Wali Kota Nomor 72 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Singkawang Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 93).

## 1.1 Aspek Geografis

Kota Singkawang terletak pada wilayah Utara Provinsi Kalimantan Barat pada titik koordinat $0^0$ 44’ 55,85” - $01^0$ 01’ 21,51” Lintang Utara dan $108^0$ 51’ 47,6” - $109^0$ 10’ 19” Bujur Timur, dengan luas wilayah 504,00 $Km^2$ atau sekitar 0,34% dari luas seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Barat, yang berbatasan dengan:

1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Sambas
2) Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bengkayang
3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bengkayang
4) Sebelah Barat berbatasan dengan Laut Natuna

Letak Kota Singkawang berada pada jalur lintasan antara Kabupaten Sambas dan Kabupaten Bengkayang, menjadikan Kota Singkawang sebagai sentral *suply* dan *demand*. Secara ekonomis hal tersebut sangat menguntungkan karena memberikan peluang besar bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan perekonomian, baik sektor perdagangan, jasa, maupun sektor lainnya sehingga membuka peluang lapangan kerja baru dan peningkatan pendapatan masyarakat.

## 1.2 Aspek Demografi

Adapun dari sisi demografi, berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, jumlah penduduk Kota Singkawang tertanggal 31 Desember 2021 sebanyak 239.377 jiwa. Dari jumlah penduduk tersebut, terdiri dari laki-laki berjumlah 122.251 jiwa dan perempuan berjumlah 117.126504 jiwa dengan sebaran penduduk di masing-masing kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2
**Penduduk Kota Singkawang Tahun 2021**
**Berdasarkan Jenis Kelamin dan Sebaran per Kecamatan**

| No | Kecamatan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| **1.** | Singkawang Timur | 12.601 | 11.367 | 23.968 |
| **2.** | Singkawang Tengah | 36.324 | 35.657 | 71.981 |
| **3.** | Singkawang Barat | 27.102 | 27.560 | 55.662 |
| **4.** | Singkawang Utara | 16.174 | 15.687 | 31.861 |
| **5.** | Singkawang Selatan | 29.050 | 26.855 | 55.905 |
| | **Jumlah** | **122.251** | **117.126** | **239.377** |

*Sumber data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota SIngkawang*

Berdasarkan data kependudukan di atas maka kepadatan penduduk Kota Singkawang pada tahun 2021 berkisar 474,95 jiwa/km², dimana penyebarannya masih belum merata. Penyebaran penduduk tersebut terpusat di wilayah perkotaan antara lain di wilayah Kecamatan Singkawang Tengah dan Kecamatan Singkawang Barat. Untuk lebih jelasnya komposisi kepadatan penduduk Kota Singkawang tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.3

**Komposisi Penduduk Menurut Tingkat Kepadatan Per Kecamatan Kota Singkawang Tahun 2021**

| No | Kecamatan | Luas (km²) | Penduduk | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Jumlah | Kepadatan Jiwa/Km² |
| 1 | Singkawang Timur | 166,26 | 23.968 | 144,16 |
| 2 | Singkawang Tengah | 31,57 | 71.981 | 2.280,04 |
| 3 | Singkawang Barat | 15,04 | 55.662 | 3.700,93 |
| 4 | Singkawang Utara | 66,65 | 31.861 | 478,03 |
| 5 | Singkawang Selatan | 224,48 | 55.905 | 249,04 |
| | **Jumlah** | **504** | **239.377** | **474,95** |

*Sumber data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, diolah oleh Bagian Organisasi Setda Kota Singkawang*

## 2. Susunan Organisasi

Sebagai daerah otonom Kota Singkawang memiliki kewenangan mencakup seluruh bidang pemerintahan kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan lainnya yang meliputi kebijakan perencanaan nasional, pengendalian secara makro, perimbangan keuangan, sistem administrasi negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya alam, teknologi tinggi yang strategis serta konservasi dan standarisasi nasional.

Kewenangan pemerintah kota sebagaimana dimaksudkan di atas terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib dibagi lagi menjadi pelayanan dasar dan non pelayanan dasar. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar mencakup bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan rakyat, kawasan pemukiman, ketertiban umum dan masalah sosial. Sedangkan urusan pemerintahan wajib

yang non pelayanan dasar mencakup bidang tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaaan dan olahraga, statistik, persandian, kebudayaan dan perpustakaan.

Urusan pilihan merupakan urusan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah. Bidang yang termasuk dalam urusan pilihan adalah kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian, transmigrasi.

Dengan pemisahan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, Pemerintah Kota Singkawang sebagai daerah otonom mengemban tugas pembangunan daerah sesuai kewenangan yang telah diberikan, salah satu alat guna mencapai terwujudnya pelayanan masyarakat dan melaksanakan pembangunan daerah dengan penataan kelembagaan yang mempunyai arti penting dan strategis untuk meningkatkan kinerja, efektivitas dan efisiensi lembaga dan aparatur Pemerintah Kota Singkawang. Tata kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang.

Dalam menjalankan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan di Kota Singkawang, Wali Kota dan Wakil Wali Kota dibantu oleh seorang sekretaris daerah, staf ahli, asisten dan kepala perangkat daerah. Perangkat daerah sebagaimana ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Organisasi Perangkat Daerah serta Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang yang terdiri dari :

1. Sekretariat Daerah;
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

3. Inspektorat Daerah;
4. 15 (lima belas) dinas daerah terdiri dari:
   1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
   2) Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana;
   3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
   4) Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan;
   5) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
   6) Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja;
   7) Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan;
   8) Dinas Lingkungan Hidup;
   9) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
   10) Dinas Perhubungan;
   11) Dinas Komunikasi dan Informatika;
   12) Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah;
   13) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
   14) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; dan
   15) Satuan Polisi Pamong Praja.
5. 4 (empat) badan daerah terdiri dari:
   1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
   2) Badan Keuangan Daerah;
   3) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
   4) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
6. Lembaga teknis daerah terdiri dari :
   1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
7. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Aziz
8. 5 (lima) kecamatan terdiri dari:
   1) Kecamatan Singkawang Barat;
   2) Kecamatan Singkawang Tengah;
   3) Kecamatan Singkawang Selatan;
   4) Kecamatan Singkawang Utara; dan
   5) Kecamatan Singkawang Timur.

## 3. Tugas dan Fungsi

Adapun tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah tersebut adalah sebagai berikut:

### 1) Sekretariat Daerah

Sekretariat daerah merupakan unit kerja yang membantu Wali Kota dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administrastif terhadap

pelaksanaan perangkat daerah serta pelayanan administratif dan mempunyai fungsi:

a. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;

b. pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah;

c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;

d. pelayanan administratif dan pembinaan ASN pada instansi daerah; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sekretaris daerah dibantu oleh asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, asisten perekonomian dan pembangunan serta asisten administrasi umum.

**2) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai kebutuhan serta mempunyai fungsi:

a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;

b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;

c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan

d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sekretaris DPRD dibantu oleh kepala bagian, kepala sub bagian, dan kelompok jabatan fungsional yang bentuknya sesuai ketentuan yang berlaku.

**3) Inspektorat Daerah**

Inspektorat daerah mempunyai tugas membantu Wali Kota membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah serta mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;

b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;

c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Wali Kota dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;

d. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Wali Kota;

e. penyusunan laporan hasil pengawasan;

f. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;

g. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;

h. pelaksanaan administrasi inspektorat; dan

i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, inspektur dibantu oleh sekretaris, inspektur pembantu wilayah, kepala sub bagian, dan kelompok jabatan fungsional yang bentuknya sesuai ketentuan yang berlaku.

**4. Dinas Daerah**

Dinas daerah merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah, dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Wali Kota melalui sekretaris daerah. Kepala dinas mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan serta mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;

d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan

tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, kepala dinas dibantu oleh sekretaris, kepala bidang, kepala sub bagian, kepala seksi dan kelompok jabatan fungsional yang bentuknya sesuai ketentuan yang berlaku.

**4) Badan Daerah**

Badan daerah dipimpin oleh seorang kepala badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Wali Kota melalui sekretaris daerah. Kepala badan mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah serta mempunyai fungsi:

a. penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;

d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, kepala badan dibantu oleh sekretaris, kepala bidang, kepala sub bagian, kepala sub bidang dan kelompok jabatan fungsional yang bentuknya sesuai ketentuan yang berlaku.

**5) Pemerintahan Kecamatan**

Kecamatan dipimpin oleh seorang camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Wali Kota melalui sekretaris daerah. Kecamatan mempunyai fungsi:

a. penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik;

b. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;

c. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

d. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

e. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota;

f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan tingkat Kecamatan;

g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;

h. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah yang ada di Kecamatan;

i. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; dan

j. pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

## 5. Sumber Daya Aparatur

Dalam melaksanakan tugasnya Wali Kota dan Wakil Wali Kota Singkawang didukung aparatur yang berjumlah 3.298 orang, jumlah tersebut belum termasuk tenaga honorer. Adapun komposisi pegawai menurut golongan secara rinci sebagai berikut:

Tabel 1.4
**Data Pegawai Menurut Golongan**
**Per 31 Desember 2021**

| Data Kepegawaian | Jumlah/ Tahun | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| **Golongan IV/a – IV/d** | 909 | 801 | 723 | 652 |
| **Golongan III/a – III/d** | 1.915 | 1.998 | 2.052 | 1.999 |
| **Golongan II/a – II/d** | 531 | 497 | 476 | 456 |
| **Golongan I/a – I/d** | 53 | 50 | 47 | 40 |
| **Jumlah** | **3.408** | **3.346** | **3.398** | **3.147** |

*Sumber data : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Singkawang*

## 6. Sumber Daya Keuangan

Pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang tahun 2021 dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021. Adapun ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.5

**Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**
**Pemerintah Kota Singkawang**
**Tahun Anggaran 2021**

| NO | Uraian | Jumlah (Rp) | | Bertambah / (Berkurang) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | (Rp) | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **4** | **PENDAPATAN** | | | | |
| **4.1** | **Pendapatan Asli Daerah (PAD)** | **175.01.000.000** | **168.881.218.902** | **(6.119.781.098)** | **(3)** |
| **4.1.1** | Pendapatan pajak daerah | 56.270.000.000,00 | 56.270.000.000,00 | 0 | 0 |
| **4.1.2** | Pendapatan retribusi daerah | 6.390.000.000,00 | 5.873.000.000 | (517.000.000) | (8) |
| **4.1.3** | Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan | 6.651.000.000 | 6.651.000.000 | 0 | 0 |
| **4.1.4** | Lain-lain PAD yang sah | 105.690.000.000 | 100.087.218.902 | (5.602.781.098) | (5) |
| **4.2** | **Pendapatan Transfer** | **671.843.132.045** | **661.330.552.094** | **(10.512.579.951)** | **(2)** |
| **4.2.1** | Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan | 613.546.084.000 | 598.425.628.666 | (15.120.455.334) | (2) |
| **4.2.2** | Pendapatan Transfer Antar Daerah | 58.297.048.045 | 62.904.923.428 | 4.607.875.383 | 8 |
| **4.3** | **Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah** | **25.672.200.000** | **31.874.981.098** | **6.202.781.098** | **24** |
| **4.3.1** | Pendapatan hibah | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4.3.3** | Pendapatan Lainnya | 25.672.200.000 | 31.874.981.098 | 6.202.781.098 | 24 |
| **JUMLAH PENDAPATAN** | | **872.516.332.045** | **862.086.752.094** | **(10.429.579.951)** | **(1)** |
| **5** | **BELANJA** | | | | |
| **5.1** | **Belanja Operasi** | **725.312.184.774** | **752.273.565.899** | **26.961.381.125** | **4** |
| **5.1.1** | Belanja pegawai | 439.398.142.625 | 426.879.015.990 | (12.519.126.635) | (3) |
| **5.1.2** | Belanja Barang | 253.443.403.327 | 295.578.082.168 | 42.134.678.841 | 17 |
| **5.1.5** | Belanja Hibah | 28.173.814.448 | 25.995.834.961 | (2.177.979.487) | (8) |
| **5.1.6** | Belanja Bantuan Sosial | 4.296.824.374 | 3.820.632.780 | (476.191.594) | (11) |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **5.2** | **Belanja Modal** | **190.870.229.363** | **387.827.582.410** | **196.957.353.047** | **103** |
| **5.2.1** | Belanja Tanah | 4.912.500.000 | 2.145.000.000 | (2.767.500.000) | (56) |
| **5.2.2** | Belanja Peralatan dan Mesin | 28.897.289.979 | 52.062.755.457 | 23.165.465.478 | 80 |
| **5.2.3** | Belanja Gedung dan Bangunan | 51.200.358.175 | 86.408.726.018 | 35.092.132.843 | 69 |
| **5.2.4** | Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi | 102.787.561.658 | 243.985315.784 | 141.197.754.126 | 137 |
| **5.2.5** | Belanja Aset Tetap Lainnya | 3.072.519.551 | 3.225.785.151 | 153.265.600 | 5 |
| **5.3** | **Belanja Tidak Terduga** | **10.000.000.000** | **10.400.000.000** | **400.000.000** | **4** |
| 5.3.1 | Belanja Tidak Terduga | 10.000.000.000 | 10.400.000.000 | 400.000.000 | 4 |
| **JUMLAH BELANJA** | | **926.182.414.137** | **1.150.501.148.309** | **224.318.734.172** | **24** |
| **SURPLUS / (DEFISIT)** | | **(53.666.082.092)** | **(288.414.396.215)** | **(234.748.314.123)** | **437** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **6** | **PEMBIAYAAN** | | | | |
| **6.1** | **Penerimaan pembiayaan** | **57.666.082.092** | **296.414.396.215** | **238.748.314.123** | **414** |
| **6.1.1** | Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) | 18.700.000.000 | 57.448.314.123 | 38.748.314.123 | 207 |
| **6.1.4** | Penerimaan Pinjaman Daerah | 38.966.082.092 | 238.966.082.092 | 200.000.000.000 | 513 |
| **JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN** | | **57.666.082.092** | **296.414.396.215** | **238.748.314.123** | **414** |
| **6.2** | **Pengeluaran Pembiayaan** | **4.000.000.000** | **8.000.000.000** | **4.000.000.000** | **100** |
| **6.2.2** | Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah | 4.000.000.000 | 8.000.000.000 | 4.000.000.000 | 100 |
| **JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN** | | **4.000.000.000** | **8.000.000.000** | **4.000.000.000** | **100** |
| **PEMBIAYAAN NETO** | | **53.666.082.092** | **288.414.396.215** | **234.748.314.123** | **437** |

*Sumber data : Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang*

## B. Permasalahan Utama (*Strategic Issued*)

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikembangkan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendesak, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah. Isu-isu strategis pembangunan Kota Singkawang dirumuskan berdasarkan permasalahan-permasalahan pembangunan daerah.

Timbulnya permasalahan pembangunan karena adanya perbedaan yang dihasilkan antara indikator capaian kinerja yang harus dapat dicapai pada akhir periode perencanaan jangka menengah dengan target capaian yang telah

ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Adanya permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan biasanya disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

a) Adanya kekuatan yang belum dikelola dan dimanfaatkan secara optimal;

b) Adanya faktor kelemahan yang tidak diantisipasi dan diatasi secara dini serta dicarikan solusinya;

c) Adanya peluang yang belum dapat diidentifikasi dan dimanfaatkan secara maksimal; dan

d) Ancaman yang sejak awal belum mendapatkan alternatif pemecahannya.

Melihat kondisi saat ini terkait dengan terjadinya wabah *covid-19* maka perkiraan pertumbuhan ekonomi di tahun 2021 maka capaian tidak bisa melebihi capaian pada tahun 2020. Dampak dari pandemi ini berdampak pada banyak sektor, dan yang paling terdampak ialah sektor kesehatan dan sektor ekonomi. Dengan belum ditemukannya obat maupun vaksin dari covid-19 ini maka tidak dapat dipastikan kapan wabah ini akan segera berakhir. Hal tersebut membuat daerah mengalokasikan anggaran belanja pada penanggulangan dan pemulihan ekonomi daerah. Dengan kondisi yang disebutkan diatas maka Isu-Isu Strategis Pembangunan Kota Singkawang Tahun 2021 meliputi :

a. Keberagaman (pluralitas) dalam masyarakat Kota Singkawang berpotensi untuk memicu terjadinya masalah sosial (konflik) jika tidak dikelola dengan baik;
b. Tata kelola pemerintahan dan manajemen keuangan daerah belum optimal, efektif dan efisien;
c. Belum sinerginya antara perencanaan dengan penganggaran untuk mendukung pembiayaan pembangunan daerah yang efektif dan efisien;
d. Kapasitas Sumberdaya Aparatur dan Pelayanan Publik belum maksimal;
e. Terbatasnya infrastruktur dasar serta Pembangunan infrastruktur yang belum merata;
f. Belum tertatanya kawasan perumahan dan permukiman;

g. Belum optimalnya pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang, pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam;
h. Belum meratanya penyelenggaraan pendidikan dan kesehatan;
i. Masih rendahnya ketahanan pangan daerah;
j. Belum optimalnya iklim usaha dan investasi;
k. Belum berkembangnya kreativitas, inovasi, ekonomi kreatif dan teknologi;
l. Belum tergalinya pengembangan pariwisata yang berbasis potensi, keunikan dan kearifan lokal;
m. Belum optimalnya pengelolaan, pengolahan hasil dan pemasaran produk pertanian;
n. Menurunnya kualitas lingkungan hidup.

# BAB II
# PERENCANAAN KINERJA

## A. Rencana Strategis

Perencanaan daerah Pemerintah Kota Singkawang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018–2022 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Singkawang Tahun 2018–2022 sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Singkawang Tahun 2018–2022.

RPJMD memuat strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program perangkat daerah serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan keuangan daerah dan rencana kerja berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

### 1. Visi

Visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang dituangkan dalam RPJMD menjadi dasar dalam perumusan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Wali Kota dan Wakil Wali Kota Singkawang untuk masa jabatan tahun 2018 – 2022, menetapkan visinya yaitu "**Singkawang HEBAT 2022**".

Rangkaian kalimat dalam pernyataan Visi Singkawang HEBAT 2022 mengandung makna strategis, sebagai berikut:

a. Harmonis dalam keberagaman agama, etnis dan budaya;
b. Ekonomi kerakyatan yang handal, kreatif dan mandiri;
c. Bersih, tegas, amanah dan efektif dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan;

d. Adil dan merata dalam pembangunan infrastruktur, kesehatan dan pendidikan;
e. Terdepan dalam perdagangan, jasa dan pengembangan pariwisata.

**2. Misi**

Misi dalam RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018 – 2022 dirumuskan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi, serta memperhatikan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Oleh karena itu, rumusan misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai target visi secara optimal.

Adapun misi yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan dan memelihara harmonisasi dalam keberagaman agama, etnis dan budaya
2. Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang handal, kreatif dan mandiri;
3. Mengoptimalkan pemanfaatan dan pengendalian potensi sumber daya alam, dalam upaya peningkatan pendapatan masyarakat;
4. Mewujudkan pemerintahan yang bersih, tegas, amanah dan efektif yang berorientasi pada pelayanan publik yang prima berbasis teknologi komunikasi dan informasi;
5. Mewujudkan sumber daya manusia yang sehat dan cerdas;
6. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang terarah dan berkesinambungan;
7. Mewujudkan Kota Singkawang sebagai kota perdagangan, jasa dan pariwisata.

**3. Tujuan dan Sasaran Strategis**

**a. Tujuan dan Sasaran Strategis**

Berkaitan dengan visi dan misi sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka arahan tujuan pembangunan Kota Singkawang terkait dengan

pernyataan misi untuk kurun waktu selama 5 (lima) tahun kedepan dapat diuraikan dalam matriks keterkaitan antar visi dan misi dengan rumusan tujuan dan sasaran sebagai berikut:

Tabel 2.1

Keterkaitan antara Misi dan Tujuan

| NO | MISI | TUJUAN | INDIKATOR TUJUAN |
|---|---|---|---|
| 1 | Mewujudkan dan memelihara harmonisasi dalam keberagaman agama, etnis Dan budaya | Mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis, kondusif, toleran dan berbudaya | Indeks Toleransi |
| | | | Persentase peningkatan seni budaya yang lestari |
| 2 | Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang handal, kreatif Dan mandiri | Terwujudnya pertumbuhan ekonomi | Persentase pertumbuhan ekonomi |
| | | | Angka kemiskinan |
| 3 | Mengoptimalkan pemanfaatan dan pengendalian potensi sumber daya alam dalam upaya peningkatan pendapatan masyarakat | Meningkatkan Potensi Sumber Daya Pertanian dan Perikanan | Persentase PDRB Sektor Pertanian |
| | | | Persentase PDRB Sektor Perikanan |
| | | Meningkatnya kualitas lingkungan hidup | Indeks Lingkungan Hidup |
| 4 | Mewujudkan pemerintahan yang bersih, tegas, amanah dan efektif yang berorientasi pada pelayanan publik yang prima berbasis teknologi komunikasi dan informasi | Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik | Indeks Reformasi Birokrasi |
| 5 | Mewujudkan sumber daya manusia yang sehat dan cerdas | Meningkatnya kualitas sumber daya manusia | IPM |
| 6 | Mewujudkan pembangunan insfrastruktur yang terarah dan berkesinambungan | Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah | Indeks kepuasan pelayanan infrastruktur |
| 7 | Mewujudkan Kota Singkawang sebagai kota perdagangan, jasa dan pariwisata | Terwujudnya pertumbuhan ekonomi sektor perdangangan dan pariwisata | PDRB sektor perdagangan |
| | | | PAD sektor pariwisata |

Tabel 2.2

Matriks Hubungan antara Tujuan dan Sasaran

| TUJUAN | INDIKATOR TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | |
|---|---|---|---|---|
| **Mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis, kondusif, toleran dan berbudaya** | Indeks Toleransi | Terwujudnya Kehidupan Masyarakat yang kondusif, dan toleran | 1 | Angka Kriminalitas |
| | | | 2 | Angka Konflik |
| | Persentase peningkatan seni budaya yang lestari | Meningkatnya pengembangan kelestarian budaya | 1 | Persentase objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya yang dilestarikan |
| **Terwujudnya pertumbuhan ekonomi** | Persentase pertumbuhan ekonomi | Meningkatnya Daya Saing koperasi, UMKM, Industri dan Ekonomi Kreatif | 1 | Volume usaha koperasi |
| | | | 2 | Volume usaha umkm |
| | | | 3 | Nilai PDRB sektor industri |
| | | | 4 | Cakupan Ekonomi Kreatif |
| | | Meningkatnya investasi daerah | 1 | Persentase pertumbuhan nilai realisasi investasi |
| | | Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka dan kemiskinan | 1 | Tingkat Pengangguran Terbuka |
| | | | 2 | Angka kemiskinan |
| **Meningkatkan Potensi Sumber Daya Pertanian dan Perikanan** | Persentase PDRB Sektor Pertanian | Meningkatnya produksi Pertanian dan perikanan yang berkontribusi terhadap perekonomian daerah | 1 | Persentase PDRB sektor Pertanian (%) |
| | Persentase PDRB Sektor Perikanan | | 2 | Persentase PDRB Sektor perikanan (%) |
| | | Meningkatnya ketahanan pangan daerah | 1 | Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi |
| **Meningkatnya kualitas lingkungan hidup** | Indeks Lingkungan Hidup | Meningkatnya kualitas sumber daya air, udara dan tutupan lahan | 1 | Indeks Kualitas Air |
| | | | 2 | Indeks kualitas udara |
| | | | 3 | indeks tutupan lahan |

| TUJUAN | INDIKATOR TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | |
|---|---|---|---|---|
| **Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik** | Indeks Reformasi Birokrasi | Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaran pemerintahan daerah | 1 | Indeks kepuasan masyarakat |
| | | | 2 | Indeks SPBE |
| | | | 3 | Nilai LPPD |
| | | Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan | 1 | Nilai SAKIP |
| | | | 2 | Opini BPK terhadap laporan keuangan |
| | | Meningkatnya kualitas sistem pengawasan internal | 1 | Maturitas SPIP |
| **Meningkatnya kualitas sumber daya manusia** | IPM | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat | 1 | Angka usia harapan hidup |
| | | Meningkatnya kualitas pendidikan | 1 | Angka harapan lama sekolah |
| | | | 2 | Angka rata-rata lama sekolah |
| **Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah** | Indeks kepuasan pelayanan infrastruktur | Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar | 1 | Persentase Jalan mantap (%) |
| | | | 2 | Persentase penduduk berakses air minum (%) |
| | | | 3 | Persentase rumah layak huni |
| | | | 4 | Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang ditangani |
| | | Menurunnya kawasan genangan banjir | 1 | Luas kawasan genangan banjir |
| **Terwujudnya pertumbuhan ekonomi sektor perdangangan dan pariwisata** | PDRB sektor perdagangan | Meningkatnya daya saing sektor perdagangan | 1 | volume usaha perdagangan |
| | PAD sektor pariwisata | Berkembangnya sektor pariwisata | 1 | Jumlah kunjungan wisatawan |
| | | | 2 | rata-rata lama tinggal |

**b. Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2021**

Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicators*) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama secara formal untuk tujuan dan sasaran strategis untuk masing-masing tingkatan (*level*) secara berjenjang. Indikator Kinerja Utama (IKU) instansi pemerintah haruslah selaras antar tingkatan unit organisasi meliputi indikator keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*).

Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama secara formal dalam satu lembaga pemerintah, diharapkan akan diperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajeman kinerja secara baik serta diperolehnya ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Penyusunan dan penetapan Indikator Kinerja Utama *(Key Performance Indicators)* di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang berpedoman pada:

a) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama;

b) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

c) Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Singkawang Tahun 2018–2022.

Selanjutnya Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Singkawang telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Singkawang Nomor 19 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Singkawang.

Adapun Indikator Kinerja Utamanya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.3

**Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Singkawang**

| NO | INDIKATOR KINERJA UTAMA | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB |
|---|---|---|
| 1 | Angka Kriminalitas | Satuan Polisi Pamong Praja |
| 2 | Angka Konflik | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 3 | Persentase Objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya yang lestari | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 4 | Volume Usaha Koperasi | Dinas Perdaganagan, Perindustrian, Koperasi dan UKM |
| 5 | Volume Usaha UMKM | Dinas Perdaganagan, Perindustrian, Koperasi dan UKM |
| 6 | Nilai PDRB sektor industri | Dinas Perdaganagan, Perindustrian, Koperasi dan UKM |
| 7 | Cakupan Ekonomi Kreatif | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga |
| 8 | Persentase Pertumbuhan Nilai Realisasi PMDN/PMA | Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja |
| 9 | Tingkat Pengangguran Terbuka | Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja |
| 10 | Angka Kemiskinan | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 11 | Nilai PDRB Sektor Pertanian (%) | Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan |
| 12 | Nilai PDRB Sektor Perikanan(%) | Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan |
| 13 | Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi | Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan |
| 14 | Indeks Kualitas Air | Dinas Lingkungan Hidup |
| 15 | Indeks Kualitas Udara | Dinas Lingkungan Hidup |
| 16 | Indeks Tutupan Lahan | Dinas Lingkungan Hidup |
| 17 | Indeks Kepuasan Masyarakat | Sekretariat Daerah |
| 18 | Nilai LPPD | Sekretariat Daerah |
| 19 | Nilai SAKIP | Sekretariat Daerah |

| | | |
|---|---|---|
| **20** | Opini BPK terhadap laporan keuangan | Badan Keuangan Daerah |
| **21** | Maturitas SPIP | Inspektorat Daerah |
| **22** | Angka Usia Harapan Hidup | Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana |
| **23** | Angka Harapan Lama Sekolah | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| **24** | Angka Rata-Rata Lama Sekolah | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| **25** | Persentase jalan mantap | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| **26** | Persentase penduduk berakses air minum | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| **27** | Persentase rumah layak huni | Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan |
| **28** | Luas kawasan pemukiman kumuh yang ditangani | Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan |
| **29** | Luas kawasan genangan banjir | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| **30** | Volume usaha perdagangan | Dinas Perdaganagan, Perindustrian, Koperasi dan UKM |
| **31** | Jumlah kunjungan wisatawan | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga |
| **32** | Rata-rata lama tinggal | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga |

Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan menjamin tercapainya sasaran strategis yang lebih optimal, secara berkala telah dilakukan reviu terhadap Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Daerah (RPJMD) Kota Singkawang 2018-2022 serta Indikator Kinerja Utama (IKU) level Pemerintah Kota Singkawang dan Perangkat Daerah.

## B. Prioritas Daerah

Rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Singkawang Tahun 2021 merupakan pelaksanaan perencanaan tahun keempat dari RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 yang penyusunannya dilakukan melalui 5 (lima) metode pendekatan, yaitu (1) Pendekatan Teknokratis, (2) Pendekatan partisipatif dan Bottom-up, 3) Pendekatan Top-Down, (4) Pendekatan Politis,

serta (5) Pendekatan Inovatif, sehingga diperoleh hasil yang akuntabel dan bermanfaat bagi masyarakat.

Perencanaan pembangunan kota tidak dapat terlepas dari arah dan kebijakan perencanaan pembangunan pusat dan provinsi. Perencanaan pembangunan kota merupakan penjabaran pelaksanaan pembangunan provinsi dan pusat. Pembangunan nasional yang ditetapkan untuk tahun 2020 tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2021 dengan tema : "Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial".

Sedangkan tema pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang tertuang RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 adalah "Perencanaan Kolaboratif untuk Optimalisasi Sumberdaya Alam, Menuju Kalbar Sejahtera". Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2021 diselaraskan untuk mendukung pencapaian pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden.

Untuk mewujudkan keselarasan antara prioritas pembangunan Kota Singkawang dengan prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional, maka RKPD Kota Singkawang tahun 2021 ditetapkan dengan tema "**Mempercepat Pemulihan Ekonomi dengan Pembangunan Infrastruktur Menuju Singkawang Hebat 2022**"

Berdasarkan hasil analisis terhadap isu-isu strategis pembangunan, prioritas pembangunan nasional, RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021, Serta RPJMD Kota Singkawang tahun 2018-2022 maka perencanaan pembangunan Kota Singkawang Tahun 2021 menetapkan 8 (delapan) prioritas pembangunan sebagai berikut :

**a) Peningkatan Kualitas Pendidikan**

Program Prioritas

- Program Pengelolaan pendidikan
- Program pengembangan kurikulum
- Program pendidik dan tenaga kependidikan

**b) Peningkatan Derajad Kesehatan**

Program Prioritas

- Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
- Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan
- Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman
- Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan

**c) Penyediaan utilitas dan sarana prasarana publik.**

Program Prioritas

- Program penataan bangunan gedung
- Program penyelenggaraan jalan
- Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)
- Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)

**d) Peningkatan pertumbuhan ekonomi**

Program Prioritas

- Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja
- Program penempatan tenaga kerja
- Program hubungan industrial
- Program pengembangan UMKM
- Program pengembangan iklim penanaman modal
- Program pelayanan penanaman modal
- Program pengelolaan perikanan tangkap
- Program pengelolaan perikanan budidaya
- Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
- Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata
- Program pemasaran pariwisata
- Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif
- Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian
- Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian
- Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting
- Program pengembangan ekspor

- Program perencanaan dan pembangunan industri

**e) Pemantapan kinerja aparatur birokrasi**

Program Prioritas

- Program Optimalisasi Sistem Informasi e-Gov
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
- Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah

**f) Pengembangan dan penataan kawasan**

Program Prioritas

- Program penyelenggaraan penataan ruang
- Program pengembangan perumahan
- Program kawasan permukiman serta permukiman kumuh

**g) Pelestarian lingkungan hidup dan pemanfaatan ruang**

Program Prioritas

- Program perencanaan lingkungan hidup
- Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
- Program pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati)
- Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (b3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah b3)
- Program penanganan pengaduan lingkungan hidup
- Program pengelolaan persampahan

**h) Harmonisasi umat beragama dan kebudayaan**

Program Prioritas

- Program pengembangan kebudayaan
- Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya
- Program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan

## C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2021 merupakan komitmen melaksanakan amanah dalam melaksanakan program/kegiatan yang disertai indikator kinerja dan target kinerja, perjanjian kinerja yang disepakati tidak terbatas pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan tetapi juga termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya.

Perjanjian kinerja Wali Kota Singkawang Tahun 2021 telah disusun dan ditandatangani oleh Wali Kota. Kinerja ini selanjutnya dijabarkan (cascading) menjadi kinerja seluruh Perangkat Daerah dan pegawai sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kinerja pada level Pemerintah Kota Singkawang berisi indikator Kinerja Utama (IKU) yang mencakup sasaran, indikator kinerja dan target sebagai berikut :

Tabel 2.4

**Perjanjian Kinerja**

| NO. | SASARAN STRATEGIS | | INDIKATOR KINERJA UTAMA | TARGET |
|---|---|---|---|---|
| **1** | Terwujudnya Kehidupan Masyarakat yang kondusif dan toleran | 1 | Angka Kriminalitas | 16 |
| | | 2 | Angka Konflik | 0 |
| **2** | Meningkatnya pengembangan kelestarian budaya | 1 | Persentase objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya yang lestari | 81,3 |
| **3** | Meningkatnya daya saing Koperasi, UMKM, Industri dan Ekonomi Kreatif | 1 | Volume Usaha Koperasi | Rp 286.972.673.200 |
| | | 2 | Volume Usaha UMKM | Rp 760.474.947.700 |
| | | 3 | Nilai PDRB sektor industri | Rp 1.057.405.595.164 |
| | | 4 | Cakupan Ekonomi Kreatif | 75 |
| **4** | Meningkatnya investasi daerah | 1 | Persentase Pertumbuhan Nilai Realisasi PMDN/PMA | 5 |

| NO. | SASARAN STRATEGIS | | INDIKATOR KINERJA UTAMA | TARGET |
|---|---|---|---|---|
| **5** | Menurunnya tingkat pengangguran terbuka dan kemiskinan | 1 | Tingkat Penganguran Terbuka | 7,15 |
| | | 2 | Angka Kemiskinan | 4,8 |
| **6** | Meningkatnya produksi pertanian dan perikanan yang berkontribusi terhadap perekonomian daerah | 1 | Nilai PDRB Sektor Pertanian (%) | 3,75 |
| | | 2 | Nilai PDRB Sektor Perikanan(%) | 2,06 |
| **7** | Meningkatnya ketahanan pangan dan daerah | 1 | Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi | 84 |
| **8** | Meningkatnya kualitas sumber daya air, udara dan tutupan lahan | 1 | Indeks Kualitas Air | 80,8 |
| | | 2 | Indeks Kualitas Udara | 85,8 |
| | | 3 | Indeks Tutupan Lahan | 34,14 |
| **9** | Meningkatnya kualitas pelayanan public dan penyelenggaraan pemerintahan daerah | 1 | Indeks Kepuasan Masyarakat | 92,5 |
| | | 2 | Nilai LPPD | Sangat Tinggi (ST) |
| | | 3 | Nilai SPBE | 2,25 (cukup) |
| **10** | Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan | 3 | Nilai SAKIP | BB |
| | | 1 | Opini BPK terhadap laporan keuangan | WTP |
| **11** | Meningkatnya kualitas system pengawasan internal | 1 | Maturitas SPIP | Level 3 |
| **12** | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat | 1 | Angka Usia Harapan Hidup | 71,9 |
| **13** | Meningkatnya kualitas pendidikan | 1 | Angka Harapan Lama Sekolah | 12,91 |
| | | 2 | Angka Rata-Rata Lama Sekolah | 7,95 |
| **14** | Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar | 1 | Persentase jalan mantap (%) | 62 |
| | | 2 | Persentase penduduk berakses air minum | 65 |
| | | 3 | Persentase rumah layak huni | 91,75 |
| | | 4 | Luas kawasan pemukiman kumuh yang ditangani | 85,34 |

| NO. | SASARAN STRATEGIS | | INDIKATOR KINERJA UTAMA | TARGET |
|---|---|---|---|---|
| **15** | Menurunnya kawasan genangan banjir | 1 | Luas kawasan genangan banjir | 2.180 |
| **16** | Meningkatnya daya saing sektor perdagangan | 1 | Volume usaha perdagangan | Rp 1.621.701.998.595 |
| **17** | Berkembangnya sektor pariwisata | 1 | Jumlah kunjungan wisatawan | 353.020 |
| | | 2 | Rata-rata lama tinggal | 1,14 |

Keseluruhan sasaran strategis yang ada dalam Perjanjian Kinerja Kota Singkawang Tahun 2021 diarahkan sebagai penunjang untuk mencapai Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang yang ingin dicapai dalam akhir masa RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022.

# BAB III
# AKUNTABILITAS KINERJA

## A. CAPAIAN KINERJA PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Singkawang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Singkawang ini memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Singkawang Tahun 2018-2022, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 dan perjanjian Kinerja Tahun 2021.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan program yang telah ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Singkawang. Pengukuran tingkat capaian kinerja dalam Laporan Kinerja Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2021 dilakukan dengan membandingkan antara target dengan realisasi dari masing-masing indikator kinerja selama periode tersebut. Hasil dari perbandingan tersebut merupakan persentase capaian target yang digunakan untuk pengukuran kinerja. Hasil atas pengukuran kinerja ini dievaluasi untuk mengetahui kegagalan/keberhasilan pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kota Singkawang.

Adapun hasil pengukuran realisasi kinerja Pemerintah Kota Singkawang terhadap 33 (tiga puluh tiga) indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam IKU maupun perjanjian kinerja Tahun 2021, adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

**Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2021**

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Terwujudnya Kehidupan Masyarakat yang kondusif dan toleran | 1 | Angka Kriminalitas | 16 | 10,28 | 155,64 |
| | | 2 | Angka Konflik | 0 | 0 | 100,00 |
| 2 | Meningkatnya pengembangan kelestarian budaya | 1 | Persentase seni dan cagar budaya yang lestari | 81,3 | 100 | 123,00 |
| 3 | Meningkatnya daya saing Koperasi, UMKM, Industri dan Ekonomi Kreatif | 1 | Volume Usaha Koperasi | 286.972.673.200 | 253.966.051.385 | 88,50 |
| | | 2 | Volume Usaha UMKM | 760.474.947.700 | 782.901.050.097 | 102,95 |
| | | 3 | Nilai PDRB sektor industri | 1.057.405.595.164 | 1.024.706.390.000 | 96,91 |
| | | 4 | Cakupan Ekonomi Kreatif | 75 | 100 | 133,33 |
| 4 | Meningkatnya investasi daerah | 1 | Persentase Pertumbuhan Nilai Realisasi PMDN/PMA | 5 | -26,49 | -529,80 |
| 5 | Menurunnya tingkat pengangguran terbuka dan kemiskinan | 1 | Angka Penganguran Terbuka | 7,15 | 9,16 | 78,06 |
| | | 2 | Angka Kemiskinan | 4,80 | 4,83 | 99,38 |
| 6 | Meningkatnya produksi pertanian dan perikanan yang berkontribusi terhadap perekonomian daerah | 1 | Nilai PDRB Sektor Pertanian (%) | 3,75 | 9,35 | 249,33 |
| | | 2 | Nilai PDRB Sektor Perikanan(%) | 2,06 | 1,99 | 96,60 |
| 7 | Meningkatnya ketahanan pangan dan daerah | 1 | Skor Pola Pangan Harapan | 84 | 84,2 | 100,24 |
| 8 | Meningkatnya kualitas sumber daya air, udara dan tutupan lahan | 1 | Indeks Kualitas Air | 80,8 | 80 | 99,01 |
| | | 2 | Indeks Kualitas Udara | 85,8 | 87,77 | 102,30 |
| | | 3 | Indeks Tutupan Lahan | 34,14 | 33,8 | 99,00 |
| 9 | Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan daerah | 1 | Indeks Kepuasan Masyarakat | 92,5 | 84,94 | 91,83 |
| | | 2 | Nilai LPPD | Sangat tinggi | | |
| | | 3 | Indeks SPBE | 2,25 | 2,6 | 115,56 |

| NO | SASARAN STRATEGIS | | INDIKATOR KINERJA UTAMA | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan | 1 | Nilai SAKIP | BB | | n/a |
| | | 2 | Opini BPK terhadap laporan keuangan | WTP | | n/a |
| 11 | Meningkatnya kualitas sistem pengawasan internal | 1 | Maturitas SPIP | Level 3 | Level 3 | 100,00 |
| 12 | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat | 1 | Angka Usia Harapan Hidup | 71,9 | 72,18 | 110,39 |
| 13 | Meningkatnya kualitas pendidikan | 1 | Angka Harapan Lama Sekolah | 7,95 | 7,9 | 99,37 |
| | | 2 | Angka Rata-Rata Lama Sekolah | 12,91 | 12,91 | 100,00 |
| 14 | Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar | 1 | Persentase jalan mantap (%) | 62 | 58,67 | 94,63 |
| | | 2 | Persentase penduduk berakses air minum (%) | 65 | 73,17 | 112,57 |
| | | 3 | Persentase rumah layak huni | 91,75 | 91,42 | 99,64 |
| | | 4 | Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang ditangani (%) | 85,34 | 52,2 | 61,17 |
| 15 | Menurunnya kawasan genangan banjir | 1 | Luas kawasan genangan banjir | 2.180 | 2047 | 93,90 |
| 16 | Meningkatnya daya saing sektor perdagangan | 1 | Volume usaha perdagangan | 1.621.701.998.595 | 1.547.104.200.000 | 95,40 |
| 17 | Berkembangnya sektor pariwisata | 1 | Jumlah kunjungan wisatawan | 353.020 | 642.114 | 181,89 |
| | | 2 | Rata-rata lama tinggal | 1,14 | 2 | 175,44 |

Hasil pengukuran kinerja dari 17 (tujuh belas) sasaran strategis dan 33 (tiga puluh tiga) Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2021 akan diuraikan sebagai berikut:

## 1. Sasaran Strategis Terwujudnya Kehidupan Masyarakat yang Kondusif dan Toleran

### a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja

Tabel 3.2
Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | | Target | Realisasi | Capaian (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Terwujudnya Kehidupan Masyarakat Yang Kondusif dan Toleran | 1 | Angka Kriminalitas | 16 | 10.28 | 155,64% |
| | | 2 | Angka Konflik | 0 | 0 | 100% |
| **Rata-rata capaian** | | | | | | **127,82%** |

Indikator Sasaran terwujudnya kehidupan masyarakat yang kondusif dan toleran digambarkan melalui indikator angka kriminalitas dan angka konflik. Realisasi kinerja pada indikator angka kriminalitas melebihi target yang ditetapkan, dengan capaian kinerjanya sebesar 155,64%, sedangkan realisasi kinerja pada indikator angka konflik tercapai sehingga capaian kinerja sebesar 100%. Secara keseluruhan pencapaian sasaran strategis terwujudnya kehidupan masyarakat yang kondusif dan toleran telah berhasil dilaksanakan dengan hasil capaian rata-rata sebesar 127,82%.

### 1) Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.3
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

| SASARAN STRATEGIS | PROGRAM | ANGGARAN | | | CAPAIAN KINERJA | TINGKAT EFISIENSI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TARGET (Rp) | REALISASI (Rp) | % | | |
| Terwujudnya Kehidupan Masyarakat Yang Kondusif dan Toleran | Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum | 192.092.507 | 192.002.507 | 99,95 | 127,82 | |
| | Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan | 17.728.646 | 17.728.646 | 100,00 | | |
| | Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik | 967.178.510 | 966.346.670 | 99,91 | | |

| SASARAN STRATEGIS | PROGRAM | ANGGARAN | | | CAPAIAN KINERJA | TINGKAT EFISIENSI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TARGET (Rp) | REALISASI (Rp) | % | | |
| | Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | 26.680.000 | 25.880.000 | 97,00 | | |
| | Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya | 13.299.200 | 12.440.800 | 93,55 | | |
| | Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial | 27.353.000 | 0 | 0 | | |
| **Rata-rata** | | | | **81,64** | **127,82** | **46,18** |

Apabila dibandingkan antara rata-rata persentase realisasi anggaran sebesar 81,64 % dan rata-rata realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 127,82%, maka dapat diperoleh tingkat efisiensi pelaksanaan pencapaian sasaran sebesar 46,18%

**2) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Pada sasaran strategis ini didukung oleh 6 (enam) program yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran strategis terwujudnya kehidupan masyarakat yang kondusif dan toleran. Adapun program/kegiatan yang capaian kinerja 100% yang menunjang pencapaian kinerja yaitu sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan capaian kinerja 100%, didukung dengan kegiatan:
   - Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan PAtroli, Pengamanan dan Pengawalan dengan capaian 100%.

- Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Walikota capaian kinerja 100%.

2. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan dengan capaian 100%, kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dengan capaian 100%
3. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik dengan capaian 100%, didukung dengan kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik dengan capaian 100%
4. Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya dengan capaian 100%, dilaksanakan melalui kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dengan capaian 100%
5. Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi enanganan konflik sosial dengan capaian 100%, dilaksanakan melalui kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial.

**b. Perbandingan antara Realisasi Kinerja selama 3 Tahun dan Target Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2022**

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja 2019, 2020,2021 dan Target Akhir 2022

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TAHUN | | | TARGET AKHIR RPJMD |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | |
| Terwujudnya Kehidupan Masyarakat yang Kondusif dan Toleran | Angka Kriminalitas | 11,83 | 8,97 | 10,28 | 15% |
| | Angka Konflik | 0 | 0 | 0 | 0 |

Angka kriminalitas yang tertangani merupakan perbandingan antara jumlah tindak kriminal yang tertangani berbanding jumlah penduduk. Jumlah penduduk Kota Singkawang mengalami kenaikan pada tahun

2021 yaitu sebanyak 239,377. Jumlah tindak kriminal yang tertangani mengalami penurunan yaitu pada tahun 2019 sebanyak 315, tahun 2020 sebanyak 213 dan tahun 2021 sebanyak 246. Dari data diatas, terlihat bahwa angka kriminalitas yang tertangani mengalami kenaikan dari sebelumnya. Hal ini menunjukan kriminalitas di Kota Singkawang meningkat dibanding dengan tahun sebelumnya diikuti pula dengan kenaikan jumlah penduduk.

Angka konflik di Kota Singkawang seperti terlihat pada tabel diatas dari tahun ke tahun selalu nihil. Hal ini berharap untuk terus dipertahankan sehingga kehidupan masyarakat semakin kondusif serta toleran.

**c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Dilakukan**

Berdasarkan data capaian kinerja pada indikator dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang kondusif dan toleran, dapat dianalisa sebagai berikut:

1. Angka kriminalitas melebihi target dikarenakan:
   a. Dalam menurunkan angka kriminalitas, berbagai program telah dilaksanakan secara bersinergi yaitu melalui program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum. Dalam program ini, kegiatan yang banyak dilaksanakan adalah patroli kewilayahan yang dilaksanakan setiap hari pada lokasi yang dianggap rawan.
   b. Beberapa program dalam masa penanganan Covid-19, secara tugas dan fungsi tetap berjalan seperti penyelesaian kasus-kasus yang diadukan oleh masyarakat, pemeliharaan ketentraman dana ketertiban masyarakat, sosialisasi kepada masyarakat terhadap pentingnya menjaga kebersihan, ketertiban dan keindahan.
   c. Meningkatkan dan mengoptimalkan citra aparatur Satuan Polisi Pamong Praja menuju profesionalisme pengabdian dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

d. Meningkatkan komunikasi yang aktif dengan baik dengan Perangkat Daerah maupun dengan stakeholder terkait dalam upaya menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan.
e. Menyiapkan payung hukum terkait pembentukan Linmas

Meskipun kinerja melebihi target, masih terdapat permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target antara lain:

a. Masih kurangnya kesadaran masayarakat terutama akan pentingnya untuk menjaga kebersihan, ketertiban dan keindahan.
b. Belum optimalnya fungsi satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan kewenangan penyidikan terhadap pelanggaran Perda.
c. Fungsi koordinasi dan kolaborasi masing kurang optimal antar kabupaten/kota dan propinsi akibat adanya persepsi yang berbeda terkait otonomi daerah.
d. Adanya keengganan stake holder untuk memiliki kesadaran bersama dalam memelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

2. Angka konflik

Sejak Tahun 2019 - 2021 Kota Singkawang sebagai salah satu kota toleransi di Indonesia dengan menetapkan Angka Konflik di Kota Singkawang sebesar 0 kejadian, hal ini untuk mengantisipasi isu strategis yang dihadapi dalam mengatasi degradasi terhadap Pancasila,

Hal ini di pengaruhi oleh:

a. Berjalanya kearifan lokal.
b. Tingkat toleransi yang tinggi di Kota Singkawang.
c. Peran aktif forum kerukunan umat beragama, forum kewaspadaan dini masyarakat, forum pembauran kebangsaan (lintas antar etnis), dalam menciptakan kehidupan masyrakat yang kondusif dan bertoleran.
d. Peran aktif dari pemerintah dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban.
e. Sinergisitas pemerintah, forum kerukunan umat beragama, forum kewaspadaan dini masyarakat, forum pembauran kebangsaan dan instansi vertikal dalam menjaga kondusifitas di Kota Singkawang.

Meskipun kinerja telah tercapai, masih terdapat permasalahan yang dihadapi dalam memenuhi target ini, antara lain:

a. Meningkatnya Potensi Konflik (Fanatisme Primodial, Intoleransi Dalam Masyarakat, Rendahnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Partai Politik, Aksi Premanisme Dalam Masyarakat Memicu Potensi Konflik Sara Dan Ekonomi)
b. Rendahnya Peran Partisipasi Organisasi/Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Pembangunan
c. Heterogenitas Masyarakat Kota Singkawang
d. Pesatnya Perkembangan Teknologi Informasi Berpotensi Memunculkan Konflik Informasi

## 2. Sasaran Strategis Meningkatnya Pengembangan Kelestarian Budaya

### a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja

Tabel 3.5
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | | Target | Realisasi | Capaian (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Meningkatnya Pengembangan Kelestarian Budaya | 1 | Persentase objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya yang dilestarikan | 81,3 | 100 | 123 |

Dalam mencapai sasaran strategis meningkatnya pengembangan kelestarian budaya melalui indikator Persentase objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya yang dilestarikan dengan realisasi tahun 2021 sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 81,3% maka capaian target pada sasaran strategis ini adalah sebesar 123 %.

#### 1) Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.6
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

| SASARAN STRATEGIS | PROGRAM | ANGGARAN | | | CAPAIAN KINERJA | TINGKAT EFISIENSI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TARGET (Rp) | REALISASI (Rp) | % | | |
| Meningkatnya Pengembangan Kelestarian Budaya | Pengembangan Kebudayaan | 230.906.300 | 226.613.858 | 98,14 | 123 | |
| Rata-rata | | | | 98,14 | 123 | 24,86 |

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 98,14 % dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 123%, maka pada sasaran ini tingkat efisiensi penggunaan sumber dayanya terjadi efisiensi sebesar 24,86 %.

**2) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Adapun program yang mendukung untuk mencapai sasaran strategis meningkatnya pengembangan kelestarian budaya dengan capaian 100% dilaksanakan melalui program Pengembangan Kebudayaan, dengan capaian kinerja sebesar 100 % melalui kegiatan :

- Pengelolaan Kebudayaan Yang Masyarakat Pelakunya Dalam daerah Kabupaten / Kota dengan capaian 100%
- Pelestarian Kesenian Tradisional dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan capaian 100%.

**b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja selama 3 Tahun dan Target Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2022**

Tabel 3.7
Perbandingan Realisasi Kinerja 2019, 2020,2021dan Target Akhir 2022

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TAHUN | | | TARGET AKHIR RPJMD |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | |
| Meningkatnya Pengembangan Kelestarian Budaya | Persentase objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya yang dilestarikan | 100% | 100% | 100% | 82,3% |

Berdasarkan tabel di atas, apabila dilihat dari capaian kinerja dalam 3 (tiga) tahun terakhir, sudah semua objek kebudayaan dan cagar budaya yang dimiliki daerah dilestarikan yaitu sebanyak 155. Hal ini telah melebihi dari target akhir RPJMD tahun 2022 sebesar 70%.

**c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Dilakukan**

Persentase objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya yang dilestarikan, telah memenuhi target sebesar 100% dikarenakan:

1. Kegiatan fasilitasi pengembangan seni budaya lokal melalui kegiatan Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI), yaitu dengan membangun jaringan antar kota yang bertujuan untuk menjaga kelestarian Benda Cagar Budaya (BCB) peninggalan sejarah.
2. Selalu meningkatkan koordinasi dengan lembaga pusat yang menangani dan menetapkan objek sebagai cagar budaya.
3. Melakukan pembinaan kepada kelompok pencinta cagar budaya.
4. Melakukan perlindungan terhadap objek yang diduga cagar budaya yang dimiliki oleh pihak swasta atau individu.
5. Memberikan bantuan dan pembinaan kepada paguyuban seni dan budaya.
6. Meningkatkan aktualisasi pagelaran seni oleh paguyuban dan kelompok seni lainnya.
7. Berupaya untuk mengoptimalkan sumber daya dan meningkatkan kapabilitas sumber daya pengelola benda, situs dan kawasan cagar budaya melalui peningkatan pengetahuan dan pengembangan kompetensi.

Meskipun kinerja telah tercapai memenuhi target, masih terdapat permasalahan yang dihadapi antara lain:

1. Minimnya sumber daya manusia/pegawai yang harus mengampu urusan kebudayaan yang meliputi urusan kesejarahan, nilai budaya, seni (film dan musik) bahasa, cagar budaya dan tenaga kesenian (seniman).
2. Belum ada daerah dalam bentuk Perda tentang perlindungan/pelestarian
3. Belum ada Perda tentang perlindungan penetapan objek sebagai cagar budaya
4. Pemanfaatan dan pengembangan kebudayaan belum maksimal karena belum terpenuhinya syarat yang ditentukan misalnya belum memiliki tim ahli cagar budaya (TACB) sehingga obyek cagar budaya belum dapat dimanfaatkan atau dikembangkan dengan baik

5. Belum adanya sarana untuk penyimpanan barang cagar budaya yang dimiliki oleh Dinas sesuai dengan standar pemeliharaan barang-barang cagar budaya
6. Belum maksimalnya peran lembaga/pranata kebudayaan
7. Masih kurangnya peran stakeholder dalam upaya pelestarian Cagar Budaya
8. Masih kurang kepedulian masyarakat dalam melakukan perlindungan terhadap objek cagar budaya

## 3. Sasaran Strategis Meningkatnya Daya Saing Koperasi, UMKM, Industri dan Ekonomi Kreatif

### a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja

Tabel 3.8
Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | | Target | Realisasi | Capaian (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Meningkatnya Daya Saing Koperasi, UMKM, Industri dan Ekonomi Kreatif | 1 | Volume Usaha Koperasi | Rp. 286.972.673.200 | Rp. 253.966.051.385 | 88,50 |
| | | 2 | Volume Usaha UMKM | Rp. 760.474.947.700 | Rp. 782.901.050.097 | 102,95 |
| | | 3 | Nilai PDRB Sektor Industri | Rp. 1.057.405.595.164 | Rp. 1.024.706.390.000 | 96,91 |
| | | 4 | Cakupan Ekonomi Kreatif | 75 | 100 | 133,33 |
| Rata-rata | | | | | | 105,42 |

Dalam mencapai sasaran strategis ke 3 yaitu meningkatnya daya saing koperasi, UMKM, industri dan ekonomi kreatif diukur melalui 4 (empat) indikator. Indikator pertama adalah volume usaha koperasi dengan target Rp. 286.972.673.200, pada akhir tahun 2021 terealisasi sebesar Rp. 253.966.051.385 sehingga capaiannya adalah 88,50%.

Indikator kedua yaitu volume usaha UMKM yang realisasinya tahun 2021 sebesar Rp. 760.474.947.700 melebihi dari target yang telah ditetapkan Rp. 782.901.050.097 sehingga capaiannya adalah 102,95 %.

Indikator ketiga yaitu Nilai PDRB sektor industri dengan target tahun 2021 sebesar Rp. 1.057.405.595.164 realisasinya adalah Rp. 1.024.706.390.000 sehingga capaiannya 96,91%.

Indikator keempat adalah cakupan ekonomi kreatif dengan target tahun 2021 sebesar 75%, realisasinya mencapai 100% sehingga capaiannya menjadi 133,33%. Dari keseluruhan indikator pada sasaran meningkatnya daya saing koperasi, UMKM, industri dan ekonomi kreatif secara rata-rata capaianyanya adalah 105,42%.

**1) Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Tabel 3.9
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

| SASARAN STRATEGIS | PROGRAM | ANGGARAN | | | CAPAIAN KINERJA | TINGKAT EFISIENSI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TARGET (Rp) | REALISASI (Rp) | % | | |
| Meningkatnya Daya Saing Koperasi, UMKM, Industri dan Ekonomi Kreatif | Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi | 136.684.975 | 124.250.725 | 90,90 | 105,42 | |
| | Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi | 104.451.159 | 100.066.804 | 95,80 | | |
| | Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian | 103.057.456 | 100.570.556 | 97,59 | | |
| | Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) | 20.747.550 | 20.533.550 | 98,97 | | |
| | Pengembangan Umkm | 1.224.334.089 | 1.177.366.513 | 96,16 | | |
| | Perencanaan Dan Pembangunan Industri | 954.867.920 | 785.268.020 | 82,24 | | |
| | Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota | 169.807.298 | 162.084.900 | 94,45 | | |
| | Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual | 246.979.824 | 246.979.824 | 99,29 | | |
| | Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | 515.062.126 | 511.001.310 | 92,21 | | |
| **Rata-rata** | | | | **93,18** | **105,42** | **12.24** |

Apabila dibandingkan antara rata-rata persentase realisasi anggaran sebesar 93,18% dan rata-rata realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 105,42%, maka dapat diperoleh tingkat efisiensi pelaksanaan pencapaian sasaran sebesar 12,24%. Dengan hasil tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa proses pencapaian kinerja pada sasaran ini telah dilaksanakan dengan efisien.

**2) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Pada sasaran strategis ini didukung oleh 9 (sembilan) program yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran strategis meningkatnya daya saing koperasi, UMKM, industri dan ekonomi kreatif.

Adapun program/kegiatan yang capaian kinerja 100% yang menunjang pencapaian kinerja yaitu:

a. Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi dengan capaian kinerja 178,57%, yang dilaksanakan melalui kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota capaian 100%
b. Program penilaian kesehatan KSP/USP koperasi, capaian 130,71%, melalui kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Ke anggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota capaian 100%.
c. Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM) Capaian 149,00%, yang dilaksanakan melalui kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan capaian 163,67%.
d. Program pengembangan UMKM capaian 148,20%, yang dilaksanakan melalui kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil capaian 100%.
e. Program perencanaan dan pembangunan industri dengan capaian 253,00%%, yang dilaksanakan melalui kegiatan Penyusunan dan

Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota dengan capaian 100%.

f. Program pengendalian izin usaha industri Kabupaten/Kota dengan capaian 104,87%, yang dilaksanakan melalui kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota capaian 100%.

g. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dengan capaian kinerja 100%, yang dilaksanakan melalui kegiatan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif.

h. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan capaian kinerja 100%, yang dilaksanakan melalui kegiatan:

   1. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar.
   2. Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif.

**b. Perbandingan antara Realisasi Kinerja selama 3 Tahun dan Target Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2022**

Tabel 3.10
Perbandingan Realisasi Kinerja 2019, 2020,2021 dan Target Akhir 2022

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TAHUN | | | TARGET AKHIR RPJMD |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | |
| Meningkatnya Daya Saing Koperasi, UMKM, Industri dan Ekonomi Kreatif | Volume Usaha Koperasi | Rp255.404.657.566 | Rp. 237.699.347.613 | Rp. 253.966.051.385 | Rp. 304.191.033.500 |
| | Volume Usaha UMKM | Rp737.771.510.097 | Rp.753.658.510.097 | Rp. 782.901.050.097 | Rp. 836.522.442.400 |
| | Nilai PDRB Sektor Industri | Rp. 1.449.967.880.000 | Rp. 1.009.686.970.000 | Rp. 1.024.706.390.000 | Rp. 1.110.275.874.922 |
| | Cakupan Ekonomi Kreatif | 75 | 100 | 100 | 93,75 |

Pada table diatas, dapat terlihat bahwa:

1. Tahun 2020 volume usaha koperasi terjadi penurunan yang cukup signifikan diakibatkan oleh adanya pandemi covid. Pada tahun 2021 terdapat kenaikan namun masih belum bisa mencapai capaian pada tahun 2019.
2. Adanya trend peningkatan volume usaha UMKM yang cukup signifikan yang dimulai dari tahun 2019 sampai tahun 2020. Volume usaha UMKM pada tahun tersebut telah melebihi target pada akhir tahun RPJMD.
3. Nilai PDRB tahun 2021 sedikit mengalami kenaikan dibanding tahun 2020, namun angka tersebut masih dibawah capaian pada tahun 2019 dan Target akhir RPJMD 2022.
4. Adanya peningkatan cakupan ekonomi kreatif pada tahun 2020 dan tahun 2021. Adanya peningkatan ekonomi kreatif yang ditangani. Pada tahun 2020, terdapat 16 sub sektor yang ditangani dari 16 sub sektor yang ada di Kota Singkawang. Pada tahun 2021, jumlah sub sektor yang ada di Kota Singkawang sebanyak 17 sub sektor dan sudah tertangani semua.

**c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan**

1. Indikator volume usaha koperasi, tidak memenuhi target dikarenakan beberapa sebagai berikut:
   a. Masih terdapat koperasi tidak secara aktif menjalankan usaha koperasi dari 105 koperasi, yang aktif hanya 78 koperasi.
   b. Terbatasnya kapasitas sumber daya manusia pembina koperasi dalam menangani pembinaan koperasi.
   c. Kurangnya kompetensi SDM pengurus/ pengelola koperasi khususnya terkait penyusunan Laporan Triwulan.
   d. Pengelolaan koperasi oleh pengurus belum menjadi prioritas utama sehingga berpengaruh terhadap pengelolaan koperasi yang ada.
   e. Lemahnya kaderisasi dalam pengurusan kelembagaan koperasi.
   f. Masih banyak pengurus/ pengelola koperasi yang belum memahami kriteria dalam penilaian Kesehatan Koperasi.

g. Kurangnya koperasi yang memenuhi standar kesehatan koperasi.
h. Masih rendahnya tingkat kepatuhan koperasi terhadap ketentuan yang berlaku sehingga berpengaruh pada pengelolaan koperasi.
i. Kurangnya SDM koperasi yang memadai tentang manajemen perkoperasian terutama terkait aplikasi

Beberapa upaya telah dilaksanakan, antara lain:

a. Meningkatkan mutu pelayanan aparatur pemerintah dalam melaksanakan pembinaan koperasi dengan penerapan sistem, prosedur dan tata cara pendirian/pendaftaran koperasi sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
b. Melakukan pembinaan dan fasilitasi secara berkesinambungan terhadap koperasi.
c. Peningkatan kompetensi SDM Koperasi melalui keikutsertaan petugas koperasi pada pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh pihak luar.
d. Peningkatan kompetensi pembina koperasi
e. Peningkatan pengawasan terhadap koperasi

2. Indikator volume usaha UMKM, dengan capaian kinerja sebesar 102,95% atau melebihi target yang telah ditetapkan. Capaian ini dikarena beberapa hal antara lain:
   a. Pemerintah melakukan pembinaan kepada kelompok UMKM.
   b. Adanya bantuan Pemerintah untuk sarana prasarana pendukung produksi UMKM.
   c. Berbagai stimulan dan promosi terus digulirkan untuk meningkatkan daya saing UMKM yaitu dengan menggerakan UMKM melalui bidang pariwisata. Sebab pariwisata memberikan dampak langsung bagi perputaran UMKM, mulai dari kuliner maupun penginapan.
   d. Menjalin kemitraan dan memasarkan produk UMKM ke toko-toko di Kota Singkawang dan sekitarnya.

f. Semakin berkembangnya kreatifitas kelompok UMKM dalam mengembangkan daya jual produknya.
g. Meningkatnya jiwa kewirausahaan pada kelompok UMKM.

Namun dalam pelaksanaan selalu masih ada permasalahan yang akan berpengaruh terhadap peningkatan volume UMKM, antara lain:

a. Masih rendahnya kualitas daya saing produk UMKM dalam menghadapi pasar nasional.
b. Masih kurangnya sarana dan prasarana usaha mikro kecil yang dikelola sehingga perlu peningkatan fasilitas sarana prasarana pengembangan usaha bagi UMKM.
c. Lemahnya kompetensi pengelola UMKM.
d. Belum optimalnya manajemen keuangan pada kelompok UMKM.
e. Belum optimalnya sinergitas antar unit kerja untuk pengembangan UMKM.
f. Bencana epidemi covid yang mempengaruhi peningkatan volume UMKM.

3. Indikator nilai PDRB sektor industri, secara umum meningkat. Hal ini disebakan antara lain:
   a. Pemerintah memberikan bantuan kepada pelaku IKM berupa sarana dan prasarana produksi baik dalam bentuk mesin peralatan maupun rumah produksi.
   b. Melakukan pembinaan melalui pelatihan keterampilan dan pemanfaatan teknologi kepada pelaku IKM.
   c. Berkembangnya kreatifitas pelaku IKM yang berpengaruh pada peningkatan produksi.

   Permasalahan yang masih dialami dalam pencapaian target :

   a. Masih rendahnya kualitas daya saing produk IKM dalam menghadapi pasar nasional.
   b. Masih kurangnya sarana dan prasarana usaha IKM yang dikelola sehingga perlu peningkatan fasilitas sarana prasarana pengembangan usaha bagi pelaku IKM.
   c. Kurangnya penguasaan teknologi bagi pelaku IKM.

d. Belum optimalnya manajemen keuangan pada kelompok IKM.
e. Belum optimalnya sinergitas antar unit kerja untuk pengembangan IKM.
f. Keterbatasan jaringan usaha kerjasama antar pelaku IKM dengan pasar modern terkait sistem pemasaran.
g. Tidak adanya promosi melalui even-even berskala lokal maupun nasional akibat pandemi covid

4. Indikator cakupan ekonomi kreatif, telah melebihi target sehinga capaiannnya sebesar 100%.

   Ekonomi kreatif merupakan konsep pengembangan ekonomi yang mengadalkan daya kreasi untuk menciptakan produk maupun menambah nilai/produk.

   Saat ini di Kota Singkawang terdapat 17 sub sektor ekonomi kreatif yang terdata dan tertangani. Keberhasilan ini dikarenakan:

   a. Melaksanakan pembinaan pelaku ekonomi kreatif secara terus menerus untuk pengembangkan konten, kreasi dan teknologi kreatif yang lebih optimal.
   b. Dukungan Pemerintah Pusat terhadap pengembangan ekonomi kreatif di daerah.
   c. Telah terbentuknya komunitas ekonomi kreatif di Kota Singkawang yang dilakukan pembinaan oleh dinas terkait.

   Masih terdapat permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan ekonomi kreatif, antara lain:

   a. Masih terdapat pelaku ekonomi kreatif didalam tiap sub sektor yang belum terfasilitasi.
   b. Perlunya fasilitas pusat kreasi yang permanen yang sepenuhnya dikelola oleh komunitas kreatif Singkawang sebagi tempat pelatihan, promosi, pertemuan dan lain-lain
   c. Pengembangan konten, kreasi dan teknologi kreatif belum optimal.
   d. Belum sinergisnya pengembangan antara pelaku ekonomi kreatif dengan pelaku industri pariwisata lainnya.
   e. Belum maksimalnya manajemen perencanaan dalam pengembangan ekonomi kreatif.

f. Lemahnya kapabilitas SDM pelaku ekonomi kreatif.

## 4. Sasaran Strategis Meningkatnya Investasi Daerah

### a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja

Tabel 3.11
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | | Target | Realisasi | Capaian (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Meningkatnya Investasi Daerah | 1 | Persentase Pertumbuhan Nilai Realisasi PMDN/PMA | 5,00% | -26,49% | 0 |

Dalam mengukur sasaran meningkatnya investasi daerah yaitu melalui indikator persentase pertumbuhan nilai realisasi PMDN/PMA. Pada tahun 2021 ini ditargetkan tumbuh sebesar 5%. Penetapan target pada RPJMD dengan memperhatikan tren pertumbuhan nilai realisasi PMDN/PMA 2 (dua) tahun sebelumnya. Pada tahun 2021, indikator persentase pertumbuhan nilai realisasi PMDN/PMA di Kota Singkawang mengalami penurunan yang sangat jauh yakni -26,49%. Tahun 2020 nilai realisasi investasi di Kota Singkawang mencapai Rp.830,28 milyar, sedangkan tahun 2021 terealisasi Rp.610,36 milyar yang berarti penurunan nilai investasi sebesar Rp.219,92 milyar.

#### 1) Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.12
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

| SASARAN STRATEGIS | PROGRAM | ANGGARAN | | | CAPAIAN KINERJA | TINGKAT EFISIENSI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TARGET (Rp) | REALISASI (Rp) | % | | |
| Meningkatnya Investasi Daerah | Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal | 449.999.206 | 448.650.920 | 99,70% | 0 | n/a |
| | Program Promosi Penanaman Modal | 9.046.340 | 8.865.160 | 98,00% | | |
| | Program Pelayanan Penanaman Modal | 2.172.025.096 | 2.123.642.376 | 97,77% | | |
| | Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal | 335.167.470 | 268.830.006 | 80,21% | | |
| | Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal | 4.532.550 | 3.958.400 | 87,33% | | |
| **Rata-rata** | | | | 92,60 | 0 | n/a |

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 92,60 % dan realisasi capaian kinerja sasaran 0, maka pada sasaran ini tidak dapat dihitung tingkat efisiensinya.

**2) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Program yang dilaksanakan dalam upaya mencapai target capaian strategis yaitu :

1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, dengan capaian 19.333,33% didukung dengan kegiatan pembuatan peta potensi investasi kabupaten/kota dengan capaian 100%;
2. Program promosi penanaman modal, dengan capaian 111,11%, didukung dengan kegiatan penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota dengan capaian 100%;
3. Program pelayanan penanaman modal, dengan capaian 102,28% didukung dengan kegiatan pelayanan perizinian dan non perizinan secara terpadu satu pintu dibidang penanaman modal dengan capaian 98,78%;
4. Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal, dengan capaian 111,11% didukung dengan kegitan pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota dengan capaian 100%;
5. Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal, dengan capaian 111,11% didukung dengan kegiatan pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah kabupaten/kota dengan capaian 100%.

**b. Perbandingan antara Realisasi Kinerja selama 3 tahun dan Target Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2022**

Tabel 3.13
Perbandingan Realisasi Kinerja 2019, 2020,2021 dan Target Akhir 2022

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TAHUN | | | TARGET AKHIR RPJMD |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | |
| Meningkatnya Investasi Daerah | Persentase Pertumbuhan Nilai Realisasi PMDN/PMA | 357,35 | 64,19 | -26,49% | 25 |

Pada tabel diatas terlihat persentase pertumbuhan nilai realisasi investasi di Kota Singkawang mengalami penurunan mulai dari tahun 2020 sampai tahun 2021 hal ini merupakan dampak langsung dari pandemi covid19 yang terus ada hingga saat ini yang sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Singkawang.

**Kondisi Realisasi Nilai Investasi (PMDN/PMA)**
**Kota Singkawang**
**Periode Tahun 2018 s.d 2021**

| No. | Uraian | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Jumlah Investor (PMDN / PMA) (Investor) | 114 | 366 | 255 | 2.720 |
| 2 | Jumlah Nilai Investasi (PMDN/PMA) (Milyar rupiah) | 110,57 | 505,70 | 830,28 | 610,36 |
| 3 | Kenaikan / penurunan nilai realisasi (PMDN/ PMA) (Milyar rupiah) | 33,64 | 395,125 | 324,59 | -219,92 |
| 4 | Persentase Kenaikan/ Penurunan Nilai Investasi (PMDN/PMA) (%) | 43,73 | 357,35 | 64,19 | -26,49 |
| 5 | Jumlah tenaga kerja pada perusahaan (PMDN / PMA) (Orang) | 339 | 1.246 | 1.630 | 8.461 |
| 6 | Rasio daya serap tenaga kerja (%) | 2,97 | 3,40 | 6,39 | 3,11 |

Sumber : Bidang Penanaman Modal, DPMTK.

**c. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta permasalahan yang masih dihadapi**

Capaian kinerja dari meningkatnya investasi daerah tidak terealisasi sesuai dengan yang ditargetkan, akan tetapi secara capaian kinerja program seluruh program dapat tercapai dengan sangat baik. Turunnya realisasi nilai investasi tahun 2021 dibandingkan dengan realisasi nilai investasi tahun 2020, secara umum disebabkan hal sebagai berikut :

1. Perubahan kebijakan pemerintah terkait aplikasi perizinan OSS RBA. Perubahan aplikasi ini mengalami permasalahan dan pengembangan pada beberapa waktu. Akibatnya banyak pelaku usaha mengalami kesulitan masuk dan mendaftarkan usahanya sehingga sempat terjadi

kevakuman dan sangat berdampak pada rendahnya nilai investasi yang didaftarkan.

2. Perubahan kebijakan pendaftaran nilai rencana investasi pada pengajuan izin usaha (NIB). Perubahan ini berpengaruh pada nilai investasi. Karena kebijakan sebelumnya pada aplikasi OSS.1.1 pelaku usaha pelaku usaha yang mendaftarkan usahanya untuk mendapatkan NIB diwajibkan mengisi nilai rencana investasi termasuk tanah dan bangunan, namun pada aplikasi OSS.RBA pelaku usaha hanya diwajibkan mengisi nilai rencana investasi yaitu modal kerja/modal operasional saja tidak termasuk tanah dan bangunan. sementara nilai realisasi selama ini dapat terungkit karena besarnya nilai pada pembelian tanah dan bangunan/gedung. akibatnya, setelah OSS RBA diterapkan, nilai investasi yang terdaftar bernilai kecil
3. Tidak ada Perusahaan besar yang terdaftar pada tahun 2021. Salah satu dampak terjadinya pandemi covid-19 adalah menurunnya minat investor besar untuk berinvestasi. Namun di sisi lain, usaha mikro sangat berkembang pasa masa pandemi, sesuai dengan salah satu kebijakan pemerintah pusat dengan memberikan bantuan permodalan bagi masyarakat yg tidak bekerja dan membuka lapangan usaha secara mandiri. Hal ini tampak pada pendaftaran NIB, dimana pada tahun 2021 perizinan didominiasi dengan usaha skala mikro yaitu sebanyak 2.720 dibandingkan tahun 2020 sebanyak 1951 (mengalami kenaikan sebanyak 39,4%). Sedangkan pada tahun 2020, terdapat usaha besar yang berinvestasi di Kota Singkawang, yang menyumbangkan peningkatan nilai invetasi, seperti: PT Naram Terang Gemilang (rencana rumah sakit internasional) dengan nilai rencana investasi sebesar Rp. 397 M, dan Rumah Sakit Abdul azis sebesar Rp. 260 M dari total nilai invetasi tahun 2020 sebesar Rp. 830, 28 M.
4. Berkurangnya anggaran pada kegiatan promosi penanaman modal akibat dari refocusing untuk penanganan covid.
5. Terjadinya pandemi covid19 yang menghambat pertumbuhan ekonomi dan berdampak pada menurunnya minal investor besar untuk berinvestasi di Kota Singkawang.

Sebagai upaya dalam mengatasi hamabatan dan kegagalan yang dilakukan, antara lain :

1. Melakukan koordinasi yang intensif dengan perangkat daerah teknis melalui tim koordinasi penanaman modal dalam menyusun peta potensi dan peluang investasi di Kota Singkawang;
2. Menyajikan data dan informasi yang lebih lengkap dalam rangka promosi dan penawaran kepada investor;
3. Melakukan strategi promosi secara elektronik dan melalui media massa
4. Melaksanakan pengendalian penanaman modal secara optimal kepada pelaku usaha di Kota Singkawang terutama kepada pelaku usaha yang belum berizin.

## 5. Sasaran Strategis Menurunnya tingkat pengangguran terbuka dan kemiskinan

### a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja

Tabel 3.14
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | | Target | Realisasi | Capaian (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka dan Kemiskinan | 1 | Angka tingkat Pengangguran Terbuka | 7,15 | 9,16 | 78,06 |
| | | 2 | Angka Kemiskinan | 4,80 | 4,83 | 99,38 |
| | | Rata – rata | | | | 88,72 |

Pada sasaran strategis menurunnya tingkat pengangguran terbuka dan kemiskinan diukur melalui indikator angka pengangguran terbuka dan angka kemiskinan. Pada tahun 2021, angka tingkat pengangguran terbuka mencapai 9,16 % dari 7,15% yang ditargetkan sehingga capaian kinerjanya adalah 78,06%. Sedangkan angka kemiskinan pada tahun 2021 adalah 4,83 %, dari target sebesar 4,80% sehingga pencapaiannya adalah 99,38 %. Secara rata-rata capaian kinerja pada sasaran strategis ini adalah 88,72 %.

### 1) Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.15
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

| SASARAN STRATEGIS | PROGRAM | ANGGARAN | | | CAPAIAN KINERJA | TINGKAT EFISIENSI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TARGET (Rp) | REALISASI (Rp) | % | | |
| Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka dan Kemiskinan | Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja | 44.298.957 | 43.282.198 | 97,70 | 97,62 | n/a |
| | Penempatan Tenaga Kerja | 19.277.950 | 19.059.500 | 98,87 | | |
| | Hubungan Industrial | 89.864.270 | 72.391.660 | 80,56 | | |
| | Pemberdayaan Sosial | 104.351.943 | 84.455.300 | 80,93 | | |
| | Penanganan warga Negara migran korban tindak kekerasan | 8.633.340 | 5.127.900 | 59,40 | | |
| | Rehabilitasi Sosial | 324.452.412 | 301.477.054 | 92,92 | | |
| | Perlindungan dan Jaminan Sosial | 396.826.597 | 393.023.200 | 99,04 | | |
| | Penaganan Bencana | 112.525.950 | 55.414.800 | 49,25 | | |
| | Pemenuhan Hak Anak | 81.158.050 | 62.939.500 | 77,55 | | |
| | Perlindungan Perempuan | 171.895.300 | 66.484.300 | 38,68 | | |
| | Perlindungan Khusus Anak | 135.971.000 | 7.047.000 | 5,18 | | |
| **Rata - rata** | | | | **70,92** | **88,72** | **n/a** |

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 70,92 % dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 88,72 %, maka pada sasaran ini tingkat efisiensi penggunaan sumber dayanya masih belum efisien dikarenakan capaian kinerjanya belum mencapai 100%.

### 2) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Pada sasaran strategis ini didukung oleh 11 (sebelas) program yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran strategis menurunnya tingkat pengangguran terbuka dan kemiskinan. Adapun program/kegiatan yang capaian kinerja 100% yang menunjang pencapaian kinerja yaitu sebagai berikut:

a. Program hubungan industrial dengan capaian kinerja 100%, melalui kegiatan:

1. Pengesahan peraturan perusahaan dan pendafataran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 daerah kabupaten/kota capaian 100%.
2. Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kejra dan penutupan perusahaan di daerah kabupaten/kota capaian 100%.

b. Program pemberdayaan sosial dengan capain kinerja 100%, dengan kegiatan Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten/kota dengan capaian 100%;

c. Program Penaganan warga Negara migram korban tindak kekerasan dengan capaian 100%, melalui kegiatan pemulangan warga Negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di daerah kabupaten/kota untuk dipulangkan ke desa/kelurahan asal capaian 100%.

d. Program Rehabilitasi Sosial dengan capaian kinerja 100%, kegiatan :
   1. Rehabilitasu Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial, dengan capaian 100%
   2. Rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti sosial dengan capaian 100%.

e. Program Perlindungan dan Jaminan Sosia dengan capaian kinerja 100%, kegiatan :
   1. Pemeliharaan anak-anak terlantar, dengan capaian 100%
   2. Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota, dengan capaian 100%.

3. Program Penaganan Bancana dengan capaian kinerja 100%, melalui kegiatan:
   1. Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota, dengan capaian 100%.
   2. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten/kota, dengan capaian 100%.

4. Program Pemenuhan Hak Anak dengan capaian kinerja 100%, kegiatan Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota, dengan capaian 100%.

Adapun program/kegiatan yang capaian tidak mencapai 100% dalam pencapaian kinerja, yaitu:

a. Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja dengan capaian kinerja 90%, melalui kegiatan Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi.
b. Program Penempatan tenaga kerja, dengan capaian kinerja 65,47% melalui kegiatan pengelolaabn informasi pasar kerja.
c. Program perlindungan perempuan, dengan capaian kinerja 88,89%. Dilaksanakan melalui kegiatan:
   1. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota
   2. Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan kabupaten/kota
   3. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah kabupaten/kota
d. Program perlindungan khusus anak, dengan capaian 74,29%, dilaksanakan melalui kegiatan penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten/kota.

**b. Perbandingan antara Realisasi Kinerja selama 3 Tahun dan Target Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2022**

Tabel 3.16
Perbandingan Realisasi Kinerja 2019, 2020,2021 dan Target Akhir 2022

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TAHUN | | | TARGET AKHIR RPJMD |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | |
| Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka dan Kemiskinan | Angka tingkat pengangguran Terbuka | 8,54 | 8,78 | 9,16 | 6.85 |
| | Angka Kemiskinan | 4,91 | 4,53 | 4,83 | 4,60 |

Pada tabel diatas tingkat pengangguran terbuka setiap tahunnya selalu meningkat. Hal ini dikarenakan jumlah pencari kerja yang terus bertambah setiap tahunnya tetapi belum diikuti dengan kesempatan kerja yang luas. Jumlah pengangguran terbuka usia angkatan kerja menunjukan peningkatan setiap tahun. Terjadi peningkatan cukup signifikan pada tahun 2021 yang disebabkan oleh pandemi covid 19 yaitu sebanyak 10.082 dibanding tahun sebelumnya 9.411 orang. Jumlah penduduk Angkatan kerja juga bertambah cukup banyak pada tahun 2021 yaitu sebanyak 110.114 dibanding tahun 2020 sebanyak 107.152.

**Kondisi Ketenagakerjaan Kota Singkawang**
**Periode Tahun 2018 s.d 2021**

| No. | Uraian | Th. 2018 | Th. 2019 | Th. 2020 | Th. 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| **TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA** | | | | | |
| 1 | Jumlah Angkatan Kerja yang Menganggur (orang) | 7.530 | 6.888 | 9.411 | 10.082 |
| 2 | Jumlah Angkatan Kerja (orang) | 95.504 | 106.963 | 107.152 | 110.114 |
| 3 | Tingkat Pengangguran Terbuka (%) | 7,88% | 6,44% | 8,78% | 9,16% |
| **PENCARI KERJA YANG DITEMPATKAN** | | | | | |
| 1 | Pencari kerja yang ditempatkan (orang) | 21 | 49 | 31 | 22 |
| 2 | Pencari kerja terdaftar (orang) | 258 | 249 | 88 | 112 |
| 3 | Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan (%) | 8,14% | 19,68% | 35,23% | 19,64% |
| **TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA** | | | | | |
| 1 | Jumlah Angkatan Kerja (orang) | 95.504 | 106.963 | 107.152 | 110.114 |
| 2 | Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun ke atas (orang) | 156.384 | 159.726 | 167.844 | 171.213 |
| 3 | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) | 61,07% | 66,97% | 63,84% | 64,31% |
| **RASIO DAYA SERAP TENAGA KERJA** | | | | | |
| 1 | Jumlah proyek investasi (PMA/PMDN) (investor) | 114 | 366 | 255 | 2.720 |
| 2 | Jumlah Tenaga Kerja pada proyek investasi (PMA/PMDN) (orang) | 339 | 1.246 | 1.630 | 8.461 |
| 3 | Rasio daya serap tenaga kerja | 2,97 | 3,40 | 6,39 | 3,11 |

Sumber : DPMTK

Selanjutnya untuk angka kemiskinan di Kota Singkawang pada tahun 2021 mengalami kenaikan dibanding 2 tahun sebelumnya, angka ini jika dibanding dengan target yang ditetapkan pada akhir RPJMD masih belum bisa terealisasi.

**c. Analisis Penyebab Kegagalan atau Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Dilakukan**

1. Indikator tingkat pengangguran terbuka belum mencapai target dan semakin meningkat, hal ini disebabkan :
   a. Akibat pandemi Covid19 yang terus berlangsung hingga tahun 2021, sehingga banyak karyawan yang diberhentikan dan kehilangan lapangan pekerjaan.
   b. Lapangan kerja yang semakin berkurang sebagai akibat langsung pandemi covid 19 yang memberikan dampak sangat besar terhadap tingkat pengangguran.
   c. Ketidaksesuaian antara lapangan kerja dengan keahlian tenaga kerja dan pendidikannya.
   d. Jiwa kewirausahaan yang belum terbentuk untuk menumbuhkan lapangan kerja baru.

   Untuk mengatasi hambatan tersebut dilakukan upaya sebagai berikut :
   a. Melakukan pendataan terkait lapangan usaha yang mengalami penutupan atau pengurangan tenaga kerja serta pendataan terkait tenaga kerja yang mengalami PHK termasuk yang dirumahkan.
   b. Memotivasi pencari kerja untuk mengembangkan jiwa kewirausahaan.
2. Indikator angka kemiskinan belum mencapai target, dikarenakan :
   a. Pandemi covid 19 yang masih terus berjalan hingga tahun 2021, mengakibatkan cukup banyak yang kehilangan pekerjaan dan mengalami penurunan dalam berusaha.
   b. Belum optimalnya sinergisitas program pengentasan kemiskinan antar instansi.
   c. Masih belum optimalnya peran TKPKD dalam sinkronisasi program-program pengentasan kemiskinan.

d. Masih besarnya potensi kemiskinan intergeneratif.
e. Masih lemahnya aksesbilitas informasi program pengetasan kemiskinan bagi masyarakat miskin dan orang tidak mampu.
f. Kurangnya inisiatif dan motivasi kelompok masyarakat miskin dalam upaya peningkatan kesejahteraannya.
g. Masih terdapat kewenangan yang belum dilimpahkan secara penuh kepada Pemerintah Daerah dalam penanganan kemiskinan.

Sebagai upaya pencapaian kinerja maka strategi yang dilaksanakan adalah :

a. Verifikasi dan validasi data yang selalu dilaksanakan secara berkala sehingga data masyarakat miskin selalu terupdate. Hal ini sangat berpengaruh terhadap efektifitas dan ketepatan sasaran dalam pengentasan kemiskinan.
b. Sinergisitas pemerintah dengan mitra kerja dalam pengentasan kemiskinan seperti pekerja sosial masyarakat, organisasi sosial dan lembaga kesejahteraan sosial.
c. Pemerintah Kota Singkawang berperan aktif dalam rehabilitasi sosial terhadap penyandang masalah kesejahteran sosial antara lain anak punk, gelandangan, pengemis, penyandang disabilitas, lansia terlantar dan orang dengan gangguan jiwa.
d. Pemerintah Kota Singkawang berperan aktif dalam perlindungan sosial bagi korban kebencanaan alam dan sosial.
e. Pemerintah aktif dalam pembinaan terhadap kelompok wanita terutama wanita rawan sosial ekonomi.
f. Peran aktif Pemerintah Pusat dalam pengentasan kemiskinan di daerah melalui program keluarga harapan (PKH), kelompok usaha bersama (KUBE) dan bantuan pangan non tunai (BPNT).
g. Mengoptimalkan pusat pelayanan dan pengaduan bagi masyarakat miskin dan orang tidak mampu.

## 6. Sasaran Strategis Meningkatnya produksi pertanian dan perikanan yang berkontribusi terhadap perekonomian daerah

### a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja

Tabel 3.17
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | | Target | Realisasi | Capaian (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Meningkatnya Produksi Pertanian dan Perikanan Yang Berkontribusi Terhadap Perekonomian Daerah | 1 | Nilai PDRB Sektor Pertanian | 3,75 | 9,35 | 249,33 |
| | | 2 | Nilai PDRB Sektor Perikanan | 2,06 | 1,99 | 96,60 |
| Rata – rata | | | | | | 172,96 |

Untuk mencapai sasaran strategis meningkatnya produksi pertanian dan perikanan diukur melalui 2 (dua) indikator. Pada kedua indikator ini menggunakan perhitungan angka sangat sementara yang dirilis oleh BPS Kota Singkawang. Indikator pertama yaitu nilai PDRB sektor pertanian dengan realisasi sebesar 9,35 dari target 3,75, sehingga capaian indikator nya mencapai 249,33%

Indikator kedua yaitu nilai PDRB sektor perikanan, realisasi akhir tahun mencapai 1,99 dari target 2,06. Sehingga capaian kinerja mencapai 96,60%. Dari keseluruhan indikator pada sasaran meningkatnya produksi pertanian dan perikanan secara rata-rata capaianya adalah 172,96%

#### 1) Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.18
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | PROGRAM | ANGGARAN | | | CAPAIAN KINERJA | TINGKAT EFISIENSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TARGET | REALISASI | % | | |
| Meningkatnya Produksi Pertanian dan Perikanan Yang Berkontribusi Terhadap Perekonomian Daerah | Nilai PDRB Sektor Pertanian | Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian | 1.182.563.916 | 1.123.569.960 | 95,01 | 172,96 | |
| | | Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian | 2.119.122.056 | 2.113.896.835 | 99,75 | | |
| | | Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian | 798.780.454 | 796.990.954 | 99,78 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Penyuluhan Pertanian | 262.775.759 | 257.553.449 | 98,01 | | |
| | | Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner | 348712038 | 321632.770 | 92,23 | | |
| | Nilai PDRB Sektor Perikanan | Pengelolaan Perikanan Tangkap | 3472217071 | 3439312920 | 99,05 | | |
| | | Pengelolaan Perikanan Budidaya | 843219017 | 823318237 | 97,64 | | |
| | | Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan | 585311050 | 584060800 | 99,79 | | |
| Rata-Rata | | | | | 97,66 | 172,96 | 75,3 |

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 97,66% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 172,96%, maka tingkat efisiensi dari capaian pada sasaran ini adalah sebesar 75,3%.

**2) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Pada sasaran strategis ini didukung oleh 8 (delapan) program yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran strategis meningkatnya produksi pertanian dan perikanan yang berkontribusi terhadap perekonomian daerah.

Adapun program/kegiatan yang capaian kinerja 100% yang menunjang pencapaian kinerja yaitu:

a. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian capaian kinerja 100%, melalui kegiatan :
   1. Pengawasan penggunaan sarana pertanian dan
   2. Penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam 1 daerah kabupaten/kota lain.

b. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian dengan capaian kinerja 100%, melalui kegiatan Pembangunan prasarana pertanian

c. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian dengan capaian kinerja 100%, melalui kegiatan Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/kota.
d. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap dengan capaian kinerja 100%, melalui kegiatan Pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah kabupaten/kota.
e. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya dengan capaian kinerja 100%, melalui kegiatan Pengelolaan pembudidayaan ikan.
f. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan capaian kinerja 100%, melalui kegiatan Penyediaan dan penyaluran bahan baku industry pengolahan ikan dalam 1 daerah kabupaten/kota.

**b. Perbandingan antara Realisasi Kinerja selama 3 Tahun dan Target Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2022**

Tabel 3.19
Perbandingan Realisasi Kinerja 2019, 2020, 2021 dan Target Akhir 2022

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TAHUN | | | TARGET AKHIR RPJMD |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | |
| Meningkatnya Produksi Pertanian dan Perikanan Yang Berkontribusi Terhadap Perekonomian Daerah | Nilai PDRB Sektor Pertanian | 8,85 | 9,30 | 9,35 | 4,00 |
| | Nilai PDRB Sektor Perikanan | 1,95 | 2,01 | 1,99 | 2,16 |

Nilai PDRB Sektor Pertanian sebagaimana data diatas terlihat mulai pada tahun 2019, 2020 sampai pada tahun 2021 menunjukan angka yang terus meningkat hal ini terlihat sangat positif dan sudah melebihi dari target akhir RPJMD tahun 2022. Sedangkan nilai PDRB Sektor Perikanan mulai dari tahun 2019 dan tahun 2020 mengalami kenaikan, akan tetapi di tahun 2021 ini sedikit mengalami penurunan, dari hal capaian tersebut pemerintah Kota Singkawang terus berupaya untuk dapat meningkatkan sektor tersebut dan mencapai target yang telah ditentukan dalam RPJMD.

**c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Dilakukan**

1. Indikator nilai PDRB sektor pertanian sangat dipengaruhi oleh
   - Produksi dan produktivitas tanaman pangan
   - Produksi dan produktivitas hortikultura

- Produksi dan produktivitas perkebunan
- Produksi dan produktivitas peternakan
- Jasa pertanian

Strategi dan upaya yang dilakukan Pemrintah Kota Singkawang dalam rangka pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan hal sebagai berikut :

- Optimalisasi lahan sawah melalui identifikasi lahan-lahan yang berpotensi, meningkatkan indek pertanaman serta penggunaan bibit unggul;
- Mempercepat pelaksanaan kegiatan prioritas yang ada pada perangkat daerah teknis;
- Memberikan pelatihan agribisnis serta mengubah mindset agar tidak ketergantungan pada bantuan pemerintah;
- Peningkatan kapasitas kelompok melalui diklat-diklat agar poktan kuat, mandiri dan berkembang;
- Mengoptimalkan peran dari Puskeswan dalam rangka mencegah dan mengendalikan Penyakit Hewan Menular Strategis /Zoonosis;
- Penegakan terhadap regulasi terhadap penggunaan lahan pertanian dari ancaman alih fungsi lahan.
- Mengoptimalkan pengendalian organisme pengganggu tanaman.
- Meningkatkan sarana produksi pertanian.

Walaupun capaian strategis telah mencapai target, masih terdapat beberapa hambatan yaitu :

- Adanya alih fungsi lahan dari ahan produktif beralih fungsi menjadi lahan non produktif;
- Adanya kebijakan terkait pergeseran anggaran sehingga secara langsung berdampak pada pelaksanaan program/kegiatan;
- Sebagian besar petani padi masih bersifat subsisten, berorientasi jangka pendek untuk pemenuhan kebutuhan sendiri;
- Minat generasi muda sebagai petani cenderung semakin berkurang karena tersedianya alternative kerja disektor lainnya;
- Ketergantungan petani dan peternak terhadap bantuan pemerintah;

- Belum optimalnya bantuan sarana dan prasarana pertanian;
- Munculnya Penyakit Hewan Menular Strategis/Zoonosis.

2. Untuk PDRB sektor perikanan sangat dipengaruhi oleh
   - Produksi perikanan tangkap
   - Produksi perikanan budidaya
   - Produksi pengolahan

   Indikator nilai PDRB sektor perikanan belum mencapai target, dikarenakan:
   - Belum otimalnya pemanfaatan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan sumberdaya alam (SDA) perikanan.
   - Masih kurangnya pembinaan dan penyuluhan kepada nelayan.
   - Minimnya bahan baku untuk pengolahan, dikarenakan masih mengandalkan produksi ikan yang bersifat musiman.
   - Ketergantungan nelayan terhadap bantuan pemerintah.
   - Belum semua pelaku usaha perikanan bergabung didalam kelompok /koperasi perikanan.

   Upaya yang dilaksanakan untuk dalam pemecahan dalam mengantisipasi masalah yang ada:
   - Mendorong peran serta pihak pengusaha, nelayan dan pembudidaya ikan dalam upaya meningkatkan produsi dan produktifitas, terutama dalam bantuan peralatan dan permodalan serta manajemen pengelolaan usaha.
   - Meningkatkan pembinaan dan penyuluhan kepada nelayan dan pembudidaya ikan agar mau dan mampu menerima serta menerapkan inovasi dan teknologi tepat guna yang menguntungkan.
   - Pembinaan terhadap pelaku usaha perikanan.
   - Mengembangkan sistem perekonomian masyarakat melalui pengembangan koperasi perikanan.
   - Mengupayakan usaha perikanan alternatif bagi nelayan tangkap pada musim paceklik.

- Menjalin komitmen dengan pengusaha atau swasta dalam pembinaan dan peningkatan penghasilan pelaku usaha perikanan.
- Memberikan pelatihan serta mengubah mindset agar tidak ketergantungan pada bantuan pemerintah

## 7. Sasaran Strategis Meningkatnya ketahanan pangan dan daerah

### a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja

Tabel 3.20
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | | Target | Realisasi | Capaian (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Meningkatnya Ketahanan Pangan dan Daerah | 1 | Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi | 84 | 84,2 | 100,24 |

*Angka Proyeksi 2021 aktual PPH Konsumsi

Pada indikator sasaran strategis ini, terdapat 1 (satu) indikator yaitu skor pola pangan harapan yang pada tahun 2021 ini, ditargetkan sebesar 84%. Akhir tahun 2021 hasil perhitungan proyeksi yang dilakukan oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat bersama Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Singkawang terealisasi sebesar 84,2%, sehingga capaian kinerjanya mencapai 100,24%.

#### 1) Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.21
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

| SASARAN STRATEGIS | PROGRAM | ANGGARAN | | | CAPAIAN KINERJA (%) | TINGKAT EFISIENSI (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TARGET (Rp) | REALISASI (Rp) | % | | |
| Meningkatnya Ketahanan Pangan dan Daerah | Peningkatan Diversifikasi Dan Keamanan Pangan | 582.152.200 | 573.193.246 | 98,46 | 100,24 | 4,87 |
| | Pengawasan Keamanan Pangan | 15.997.800 | 15.297.800 | 95,62 | | |
| | Pengadaan Cadangan Pangan pemerintah Daerah | 121.116.500 | 111.464.500 | 92,03 | | |
| Rata-Rata | | | | 95,37 | 100,24 | 4,87 |

Apabila dibandingkan antara rata-rata persentase realisasi anggaran sebesar 95,37% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar

100,24%, maka pada sasaran ini tingkat efisiensi penggunaan sumber dayanya dapat dikategorikan pencapaian tingkat efisien terealisasi sebesar 4,87%.

**2) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Sasaran ini dilaksanakan melalui program sebagai berikut :

1. Program Peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat dengan capaian 100% yang dilakukan melalui kegiatan :
   a. Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota;
   b. Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka.
2. Program Pengawasan Keamanan Pangan dengan capaian 100%, melalui kegiatan Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar daerah kabupaten/kota.
3. Program Pengadaan Cadangan Pangan pemerintah Daerah dengan capaian 100%

**b. Perbandingan antara realisasi kinerja selama 3 tahun dan Target Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2022**

Tabel 3.22
Perbandingan realisasi kinerja 2019, 2020, 2021 dan target akhir 2022

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TAHUN | | | TARGET AKHIR RPJMD |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | |
| Meningkatnya Ketahanan Pangan dan Daerah | Skor Pola Pangan Harapan | 84,3 | 82,89 | 84,2 | 86 |

Skor pola pangan harapan pada tahun 2021 mengalami penurunan capaian dari tahun 2020. Pemerintah daerah kedepannya berkomitmen untuk meningkatkan capaian kinerja dan bisa mencapai target yang telah ditetapkan pada dokumen RPJMD.

**c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Dilakukan**

Skor pola pangan harapan sangat dipengaruhi oleh keragaman dan keseimbangan konsumsi antar kelompok pangan. Indikator ini mencapai target.

Strategi yang dilakukan dalam pencapaian target, adalah :

1. Penyuluhan penganekaragaman konsumsi pangan kepada masyarakat.
2. Melakukan pembinaan secara rutin kepada masyarakat agar memanfaatkan pekarangan untuk menanam sebagai sumber pangan dan gizi.
3. Memberikan bantuan secara stimulan kepada kelompok masyarakat untuk memanfaatkan pekarangan dalam bentuk bibit.
4. Peran serta dari Pemerintah Pusat dalam meningkatkan ketahanan pangan.
5. Pendampingan dan penyuluhan kepada kelompok masyarakat.

Hambatan/Permasalahan yang masih dirasakan dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah:

1. Lemahnya kesadaran pada kelompok masyarakat tertentu tentang pola konsumsi pangan.
2. Masih ada kelompok masyarakat yang kurang menyadari dalam memanfaatkan lahan pekarangan.
3. Kurang optimalnya diversifikasi konsumsi pangan lokal.

Untuk mencapai target akhir RPJMD 2022, Pemerintah Kota Singkawang melalui Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan terus melakukan peningkatan capaian kinerja pada indikator sasaran strategis ini. Oleh karena itu, beberapa upaya solutif yang akan dilakukan antara lain :

1. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat terhadap pentingnya diversifikasi konsumsi pangan.
2. Peningkatan ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan lokal.

## 8. Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas sumber daya air, udara dan tutupan lahan

### a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja

Tabel 3.23
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | | Target | Realisasi | Capaian (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Air, Udara dan Tutupan Lahan | 1 | Indeks Kualitas Air | 80,8 | 80 | 99,01 |
| | | 2 | Indeks Kualitas Udara | 85,8 | 87,77 | 102,30 |
| | | 3 | Indeks Tutupan Lahan | 34,14 | 33,8 | 99 |
| Rata –rata | | | | | | 100,10 |

Dalam mencapai sasaran strategis ke-8(delapan) yaitu meningkatnya kualitas sumber daya air, udara dan tutupan lahan diukur melalui 3 (tiga) indikator. Indikator pertama adalah indeks kualitas air dengan target 80,8%, pada akhir tahun 2021 indeks kualitas air terealisasi sebesar 80%, sehingga capaian kinerja sebesar 99,01%.

Indikator kedua yaitu indeks kualitas udara yang realisasinya tahun 2021 sebesar 87,77 dari target 85,8, sehingga capaian kinerja sebesar 102,30% artinya bahwa target yang telah ditetapkan tercapai dengan baik.

Indikator ketiga yaitu indeks tutupan lahan dengan target 34,14 pada tahun 2021 realisasinya adalah 33,8 dengan capaian sebesar 99%, artinya pencapaian indikator ketiga sasaran ini hampir mencapai target.

Dari keseluruhan indikator pada sasaran meningkatnya kualitas sumber daya air, udara dan tutupan lahan secara rata-rata capaianya adalah 100,10%.

#### 1) Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.24
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

| SASARAN STRATEGIS | PROGRAM | ANGGARAN | | | CAPAIAN KINERJA | TINGKAT EFISIENSI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TARGET (Rp) | REALISASI (Rp) | % | | |
| Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Air, Udara dan Tutupan Lahan | Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup | 356.304.875 | 347.217.784 | 97,44 | 100,10 | 2,66 |

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 97,44% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 100,10 %, maka pada sasaran ini tingkat efisiensi penggunaan sumber dayanya adalah sebesar 2,66%

**2) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Adapun program yang mengusung pencapaian sasaran ini yaitu program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dengan capaian 100%, melalui kegiatan:

1. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota capaian 100%
2. Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota capaian 100%
3. Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota capaian 100%

**b. Perbandingan antara Realisasi Kinerja selama 3 Tahun dan Target Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2022**

Tabel 3.25
Perbandingan realisasi kinerja 2019, 2020, 2021 dan target akhir 2022

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TAHUN | | | TARGET AKHIR RPJMD |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | |
| Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Air, Udara dan Tutupan Lahan | Indeks Kualitas Air | 83,33 | 80 | 80 | 81 |
| | Indeks Kualitas Udara | 88,89 | 85,85 | 87,77 | 86,00 |
| | Indeks Tutupan Lahan | 26,62 | 30,21 | 33,80 | 36,53 |

Indeks kualitas air pada tahun 2021 dan tahun 2020 tetap sama yaitu pada angka 80 dan terlihat mengalami penurunan dibanding tahun 2019.

Indeks kualitas udara pada tahun 2020 di Kota Singkawang terlihat lebih baik dibandingkan pada tahun 2020. Sementara indeks tutupan lahan menunjukan angka yang semakin meningkat namun menunjukan bahwa indeks tutupan lahan masih jauh dari target akhir RPJMD yang ditetapkan.

**c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Dilakukan**

1. Indeks kualitas air

   Indeks kualitas air tahun 2021 sebesar 80% menunjukan masih pada kategori cemar ringan. Capaian indikator belum mencapai target, hal ini disebabkan oleh :

   a. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan yang berpengaruh pada kualitas air permukaan.
   b. Belum terintegrasinya sistem pengelolaan limbah domestik rumah tangga.
   c. Masih banyaknya aktifitas PETI di hulu sungai yang belum dilakukan tindakan pengendalian.

   Upaya yang dilakukan, antara lain :

   a. Melakukan Sosialisasi kepada masyarakat terhadap pentingnya kesadara menjaga kebersihan lingkungan yang berpengaruh pada kualitas air permukaan.
   b. Memberikan informasi dan himbauan kepada masyarakat terkait pengelolaan lingkungan melalui media sosial, spanduk dan bilboard.
   c. Penguatan kelembagaan pada Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan pencemaran lingkungan pada sumber daya air.
   d. Peningkatan kapasitas UPT pengelola sampah dalam rencana aksi dalam bersih lingkungan.

2. Indeks Kualitas Udara

   Indeks kualitas udara diukur pada 4 titik pantau yaitu pemukiman, industri, perkantoran dan transportasi dalam kondisi normal/ambien. Indek kualitas udara tahun 2021 sebesar 87,77. Ini menunjukan kategori sangat baik.

   Indeks kualitas udara mencapai target, hal ini disebabkan oleh :

   a. Kota Singkawang bukan termasuk dalam kategori Kota Metropolitan atau Kota Industri, sehingga kualitas udara masih baik.

b. Pemerintah Kota Singkawang memberikan himbauan kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan.
c. Sumber emisi bergerak dan tidak bergerak masih relatif kecil.
d. Kota Singkawang memiliki cagar alam raya pasi sebagai kontributor penghasil oksigen terbesar.
e. Beberapa perusahaan penghasil emisi (PLTD Sei Wie dan Sudirman) hanya beroperasi pada waktu waktu tertentu sebagai cadangan.
f. Berkurangnya aktifitas pembakaran sampah yang dilakukan oleh masyarakat sebagai akibat penanganan sampah di Kota Singkawang yang lebih baik.

3. Indeks Tutupan Lahan tahun 2021 sebesar 33,80 yang masuk dalam kategori waspada. Capaian ini masih belum mencapai target yang disebabkan oleh :
   a. Alih fungsi lahan yang digunakan untuk wilayah permukiman, pertambangan dan peternakan.
   b. Terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
   c. Penebangan liar.
   d. Kerusakan kawasan pesisir akibat dari abrasi pantai.
   e. Penambangan mineral liar

   Untuk mengatasi hambatan tersebut diatas dilakukan upaya sebagai berikut :

   a. Melaksanakan program penghijauan.
   b. Pemerintah Kota Singkawang memberikan himbauan kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan.
   c. Membentuk kelompok masyarakat peduli api untuk ikut serta dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
   d. Kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan .
   e. Rehabilitasi wilayah pesisir.
   f. Pemulihan lahan bekas tambang.

## 9. Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan daerah

### a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja

Tabel 3.26
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

| No | Sasaran Strategis | | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | 1 | Indeks Kepuasan Masyarakat | 92,5 | 84,94 | 91,83 |
| | | 2 | Nilai LPPD | ST | n/a | n/a |
| | | 3 | Indeks SPBE | 2,25 | 2,6 | 115,56 |
| Rata-rata | | | | | | 103,70 |

Pada sasaran strategis meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan daerah terdapat 3 (tiga) indikator. Indikator pertama yaitu indeks kepuasan masyarakat yang ditargetkan 92,5 pada tahun 2021 dengan realisasi akhir sebesar 84,94 dengan capaian sebesar 91,83%.

Indikator kedua yaitu nilai LPPD dengan target Sangat Tinggi, pada tahun 2021 nilai LPPD belum bisa disajikan karena sampai saat ini belum dikeluarkan hasil penilaian LPPD oleh Kementerian Dalam Negeri.

Indikator ketiga yaitu Indeks SPBE dengan target nilai 2,25, pada Tahun 2021 berhasil melebihi dari target yang ditetapkan sebesar 2,6 dengan capaian 115,56%.

Memperhatikan data capaian kinerja, untuk sementara dapat dihitung rata-rata tingkat capaian sebesar 103,70 % (tanpa nilai LPPD)

### 1) Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.27
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

| SASARAN STRATEGIS | PROGRAM | ANGGARAN | | | CAPAIAN KINERJA | TINGKAT EFISIENSI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TARGET (Rp) | REALISASI (Rp) | % | | |
| Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan | Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota | 119.170.234 | 110.523.744 | 92,74 | | |
| | Pemerintahan dan kesejahteraan rakyat | 614.277.601 | 466.774.197 | 75,99 | | |

| SASARAN STRATEGIS | PROGRAM | ANGGARAN | | | CAPAIAN KINERJA | TINGKAT EFISIENSI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Daerah | Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota | 220.227.028 | 203.277.200 | 92,30 | | |
| | Informasi dan Komunikasi Publik | 794.610.575 | 711.808.500 | 89,58 | | |
| | Aplikasi Informatika | 5.319.335.170 | 4.570.578.636 | 85,92 | | |
| | Penyelenggaraan Statistik Sektoral | 175.620.300 | 147.785.400 | 84,15 | | |
| | Penyeenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi | 4.651.300 | 4.651.300 | 100 | | |
| **Rata-rata** | | | | **88,67** | **103,70** | **15, 03** |

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 88,67% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 103,70 %, maka pada sasaran ini tingkat efisiensi penggunaan sumber dayanya mencapai 15,03.

**2) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.**

Dalam mencapai sasaran strategis meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah didukung oleh:

1. Terdapat 1 (satu) Program untuk menunjang pencapaian indikator kinerja indeks kepuasan masyarakat yaitu program penunjang urusan pemerintahan capaian 102,09%, dengan kegiatan pentaaan organisasi dan sub kegiatan fasilitasi pelayanan publik dan tatalaksana yang diampu oleh Bagian Organisasi dengan capaian sub kegiatan sebesar 100%
2. Terdapat 1 (satu) Program untuk menunjang pencapaian indikator kinerja Nilai LPPD yaitu program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat dengan kegiatan administrasi tata pemerintahan capaian kegoatan 100% dan sub kegiatan fasilitasi pelaksanaan otonomi daerah yang diampu oleh Bagian Pemerintahan dengan capaian sub kegiatan sebesar 100%.

3. Terdapat 4 (empat) program yang menunjang pencapaian indikator kinerja Indeks SPBE, yaitu :
   a. Program informasi dan komunikasi publik dengan capaian kinerja 100% melalui kegiatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/kota, dengan sub kegiatan;
      1. Perumusan kebijakan teknis bidang informasi dan komunikasi publik capaian 100%.
      2. Pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik capaian 375%.
      3. Pelayanan informasi publik capaian 100%.
      4. Layanan hubungan media capaian 100%.
      5. Peyediaan/pengadaan sarana dan prasarana pendukung informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/kota capaian 100%
   b. Program Aplikasi informatika dengan capaian kinerja 100 melalui kegiatan:
      1. Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:
         - Penatalaksanaan dan pengawasan nama domain dan sub domain dalam penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota ,capaian 100%.
         - Penyelenggaraan system jaringan intra pemerintah daerah dengan capaian 100%
      2. Pengelolaan e-government di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota, dengan sub kegiatan:
         - Koordinasi dan sinkronisasi data dan informasi elektronik capaian 100%.
         - Pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elekronik capaian 100%.

- Pengembangan dan pengelolaan sumberdaya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah capaian 100%.
- Monitoring, evaluasi dan pelaporan pengembangan ekosistem SPBE capaian 115,56%.

c. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral dengan capaian kinerja 100%, yang dilaksanakan melalui kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
   - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis, dan Diseminasi Data Statistik Sektoral capaian 100%.

d. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi dengan capaian kinerja 100%, yang dilaksanakan melalui kegiatan Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota, dengan sub kegiatan :
   - Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota capaian 100%.

Adapun program/kegiatan yang capaian tidak memenuhi capaian bahkan tidak terlaksana dan menjadi penyumbang kegagalan dalam pencapaian kinerja, yaitu:

1. Program kegiatan yang tidak memenuhi capaian bahkan tidak terlaksana, dan sangat berpengaruh terhadap capaian kinerja yaitu:
   - Sub Kegiatan Pengelolaan media komunikasi publik capaian 85,57%.
   - Sub Kegiatan Kemitraan dengan pemangku kepentingan capaian 0%.

**b. Perbandingan antara Realisasi Kinerja selama 3 Tahun dan Target Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2022**

Tabel 3.28
Perbandingan realisasi kinerja 2019, 2020, 2021 dan target akhir 2022

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TAHUN | | | TARGET RPJMD |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | |
| Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | Indeks Kepuasan Masyarakat | 82,52 | 83,74 | 84,94 | 95 |
| | Nilai LPPD | ST | n/a | n/a | Sangat Tinggi |
| | Indeks SPBE | 1,8 | 3,82 | 2,6 | 2,5 |

1. Nilai indeks kepuasan masyarakat setiap tahunnya meningkat walaupun belum mencapai target yang ditetapkan pada dokumen RPJMD.
2. Nilai LPPD pada tahun 2020 dan 2021 belum dapat diketahui karena belum dikeluarkannya hasil evaluasi penilaian LPPD oleh Kementerian Dalam Negeri.
3. Nilai Indeks SPBE pada Tahun 2021 yang dinilai langsung oleh Tim Penilai SPBE melebihi dari target yang ditetapkan. Meskipun berdasarkan data, terlihat adanya penurunan hasil dari tahun 2020, penilaian dilakukan secara mandiri oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang dengan hasil indeks sebesar 3,82.

**c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Dilakukan**

1. Indikator nilai indeks kepuasan masyarakat belum mencapai target hanya mencapai 92,83%. Terdapat hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja indikator ini adalah :
   a. Tidak teranggarkan untuk pelaksanaan survey kepuasan masyarakat maka belum menjadi prioritas utama oleh perangkat daerah sehingga adanya keterlambatan untuk menindaklanjuti hasil survey yang telah dilakukan.
   b. Keterlambatan menindaklanjuti SKM disebabkan karena keterbatasan SDM sehingga penyampaian laporan melewati batas waktu yang telah ditetapkan.

c. Belum adanya pemahaman yang sama bagi Perangkat daerah terkait peran dan fungsi survey kepuasan masyarakat.
d. Lemahnya komitmen Perangkat Daerah dalam pelaksanaan dan tindak lanjut survey kepuasan masyarakat.

Upaya pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini antara lain:

a. Melakukan bimbingan teknis tentang penyusunan SKM dengan menghadirkan narasumber dari Biro Organisasi Propinsi Kalimantan Barat;
b. Melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan survey kepuasan masyarakat.
c. Memberikan saran dan pertimbangan kepada TAPD dari hasil evaluasi hasil SKM untuk dapat dianggarkan dan menjadi target kinerja pada perangkat daerah.

2. Indikator nilai LPPD, sampai saat ini belum dikeluarkan hasil evauasi penilaian LPPD oleh KEMENDAGRI, namun tetap terdapat hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja indikator ini adalah:
   a. Adanya perubahan indikator dalam penilaian berdasarkan kategori yaitu pemerintah daerah maju, sedang dan terbelakang. Pemerintah Kota Singkawang masuk kategori sedang.
   b. Masih adanya perangkat daerah yang lambat dalam menyampaikan data.
   c. Beberapa data dukung Indikator Kinerja Kunci yang disampaikan berubah-rubah dari perangkat daerah.
   d. Dokumen laporan LAKIP menjadi salah satu bagian dalam Bab Laporan LPPD sesuai dengan perubahan peraturan, sehingga laporan LAKIP berpengaruh terhadap laporan LPPD.
   e. Dengan terbatasnya anggaran yang terus mengalami penurunan, sangat mempengaruhi capaian program kegiatan pada perangkat daerah yang berada dinawah target. Termasuk untuk pencapaian standar pelayanan minimal.

   Upaya pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini antara lain:

a. Melakukan koordinasi terkait pengisian data LPPD dengan seluruh perangkat daerah.
b. Melaksanakan sosialisasi pengisian data kepada petugas pengelola LPPD pada perangkat daerah.
c. Melakukan penguatan SDM pengelola LAKIP SKPD.
d. Melakukan koordinasi, verifikasi dan asistensi laporan LAKIP Perangkat Daerah dan dokumen pendukung LAKIP Tingkat Kota.

3. Indikator Indeks SPBE pada tahun 2021 dapat mencapai target dengan nilai "BAIK", hal ini disebabkan karena:
   a. telah terpenuhinya sebagian besar dari 48 indikator dalam penilaian SPBE;
   b. Secara keseluruhan, penerapan pada aspek TIK sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kota Singkawang dimana sudah tersedianya dokumen-dokumen dalam penerapan pengembangan aplikasi, Layanan Pusat Data, Layanan Jaringan Intra, dan Penggunaan Sistem Penghubung layanan.
   c. Kekuatan Pemerintah Kota Singkawang dalam hal aspek teknologi informasi dan komunikasi telah memiliki kematangan dalam hal layanan jaringan intra instansi. Hal ini ditunjukkan dengan adanya dokumen-dokumen terkait jaringan intranet, evaluasi jaringan dan pemanfaatan jaringan.
   d. kebijakan terkait SPBE telah dapat dipenuhi sebagai landasan dalam pelaksanaan SPBE;
   e. Infrastruktur semakin menyebar luas keseluruh Perangkat Daerah;
   f. Keadaan bennwich mencukupi untuk mensuplai keseluruh Perangkat Daerah;
   g. Aplikasi yang telah diterapkan semakin bertambah;
   h. Network operation center (NOC) semakin tinggi;
   i. Kapasitas penyimpanan arsip telah semakin baik dan telah berpindah ke Indonesia, dengan penyimpanan sebelumnya di Singapura.
   j. Terbangunnya *Telematic Control Management (TCM) Room.*

Meskipun dalam pencapaian target telah memenuhi capaian, namun masih terjadi permasalahan dalam pelaksanaan SPBE, antara lain:

a. Keterbatasan SDM pengelola TIK disetiap Perangkat Daerah dan Perangkat Daerah pengampu yaitu Dinas Komunikasi dan Informasi Publik; dan
b. Komitmen yang masih lemah pada tingkat pimpinan terkait pelaksanaan SPBE.
c. Keterbatasan anggaran sebagai akibat refocusing anggaran, sehingga beberapa kegiatan yang direncanakan tidak dapat dilaksanakan, dan pandemi covid 19 mempengaruhi untuk kegiatan sosialisasi dan peningkatan kapasitas SDM.

## 10. Sasaran Strategis Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan

### a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja

Tabel 3.29
Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | | Target | Realisasi | Capaian (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan | 1 | Nilai SAKIP | BB | n/a | - |
| | | 2 | Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan | WTP | n/a | - |

Dalam sasaran strategis meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan diukur melalui indikator kinerja utama Nilai SAKIP dan Opini BPK terhadap laporan keuangan. Pada tahun 2021 indikator nilai SAKIP dengan target BB belum dapat diketahui hasilnya karena belum dikeluarkannya hasil evaluasi oleh Kementerian PAN dan RB. Selanjutnya untuk opini BPK terhadap laporan keuangan belum bisa disajikan karena masih dalam proses pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara.

### 1) Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.30
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

| SASARAN STRATEGIS | PROGRAM | ANGGARAN | | | CAPAIAN KINERJA | TINGKAT EFISIENSI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TARGET (Rp) | REALISASI (Rp) | % | | |
| Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan | Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota | 220.227.028 | 203.277.200 | 92,30 | n/a | n/a |
| | Pengelolaan Keuangan Daerah | 14.617.655.624 | 10.580.576.501 | 72,38 | | |
| | Pengeloaan Pendapatan Daerah | 1.981.948.105 | 1.798.629.266 | 90,75 | | |
| Rata-rata | | | | 85,14 | n/a | n/a |

Apabila dibandingkan antara rata-rata persentase realisasi anggaran sebesar 80,90 % dan capaian kinerja, belum dapat dilihat adanya efesiensi.

### 2) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Dalam mencapai sasaran strategis meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan didukung oleh program/kegiatan yang capaian kinerjanya telah 100%, yaitu::

a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dengan capaian program 102,09%, melalui sub kegiatan peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi capaian 100%.
b. Program pengelolaan keuangan daerah dengan capaian 100%, melalui kegiatan koordinasi dan penyusnan rencana anggaran daerah kabupaten/kota dengan sub kegiatan:
   1. Penyusunan analisa laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, capaian 100%.
   2. Penyusunan kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi pemerintah daerah, capaian 100%.
c. Program pengelolaan Pendapatan Daerah dengan capaian 100% melalui kegiatan pengelolaan pendapatan daerah, dan sub kegiatan:

1. Penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah, capaian 95,54 %
2. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah capaian 96,99%

**b. Perbandingan antara Realisasi Kinerja selama 3 Tahun dan Target Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2022**

Tabel 3.31
Perbandingan realisasi kinerja 2019, 2020 dan 2021 dan target akhir 2022

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TAHUN | | | TARGET RPJMD |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | |
| Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan | Nilai SAKIP | B | B | n/a | BB |
| | Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan | WTP | WTP | n/a | WTP |

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2021 belum dapat diketahui karena hasil evaluasi belum dikeluarkan oleh KEMENPANRB, namun harapan nilai dan predikat LAKIP Kota Singkawang terus meningkat sampai kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah mendapatkan predikat BB sebagaimana target dalam RPJMD.

Secara berturut-turut dalam 2 (dua) tahun terakhir opini wajar tanpa pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan pemerintah Kota Singkawang berhasil diperoleh. Untuk tahun 2021, Pemerintah Kota Singkawang berupaya terus mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian. Kedepan diharapkan untuk memperhatikan keberhasilan ini dengan terus meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan.

**c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Dilakukan**

1. Indikator Nilai SAKIP Pemerintah Kota tahun 2021 telah ada peningkatan dari beberapa tahun sebelumnya yaitu predikat baik, meskipun belum mencapai target. Hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:
   a. Kualitas dokumen perencanaan belum berorientasi pada hasil atau manfaat yang langsung dirasakan pada masyarakat.

b. Penyajian analisis laporan kinerja belum tersaji secara maksimal sehingga belum dapat mendorong perbaikan perencanaan kedepan.
c. Sistem pemantauan kinerja belum dilaksanakan secara optimal karena informasi kinerja yang dihasilkan belum efektif untuk perbaikan yang diperlukan.
d. Evaluasi atas program/kegiatan perlu ditingkatkan dengan memfokuskan kepada hasil (outcome), sehingga dapat meningkatkan capaian hasil program prioritas pembangunan yang dapat memberikan kesejahteraan masyarakat.
e. Kurang maksimalnya pelaksanaan koordinasi dalam proses penyusunan anggaran, penyusunan pelaporan keuangan serta penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan aset daerah.
f. Masih lemahnya kompetensi pengelola LAKIP pada tiap perangkat daerah.
g. Masih belum maksimalnya komitmen pimpinan terhadap akuntabilitas kinerja.

Upaya pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini antara lain:

a. Penguatan terhadap tim SAKIP dengan melaksanakan koordinasi serta evaluasi terhadap langkah-langkah dalam perbaikan SAKIP Kota Singkawang.
b. Melaksanakan koordinasi dengan Tim KemenpanRB serta Provinsi.
c. Meningkatkan pemahaman dan kompetensi SDM pengelola SAKIP melalui pendampingan terhadap pengelolaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Singkawang.
d. Berkoordinasi aktif dengan seluruh perangkat daerah terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
e. Menindaklanjuti hasil rekomendasi KemenpanRB terutama perbaikan beberapa komponen yang sangat berpengaruh. Perbaikan dokumen perencanaan menjadi komponen pengungkit dalam evauasi SAKIP dan menjadi dokumen dalam materi revisi RPJMD

f. Penguatan komitmen dan integritas para pimpinan, pengelola dan para pelaksana kegiatan.

2. Indikator opini BPK terhadap laporan keuangan belum dapat disajikan mengingat masih dalam proses pemeriksaan. Memperhatikan trend selama 2 tahun terakhir Pemerintah Kota Singkawang telah memperoleh opini WTP, hal ini disebabkan karena :
   a. Pemerintah telah membuat kebijakan untuk melakukan rekonsiliasi terhadap penerimaan, belanja dan aset.
   b. Melaksanakan FGD terkait penatusahaan keuangan.
   c. Adanya regulasi terhadap kebijakan akuntansi dan sistem akuntansi.
   d. Melaksanakan koordinasi secara rutin kepada seluruh perangkat daerah terkait permasalahan aset yang menjadi kendala utama dalam pengelolaan keuangan melalui penertiban aset.
   e. Adanya himbauan tentang pengamanan barang milik daerah.
   f. Menyiapkan regulasi terkait pengamanan dan pemusnahan barang milik daerah.
   g. Semakin disiplinnya perangkat daerah dalam menyampaikan laporan keuangan yang tepat waktu.
   h. Sinergisitas unit kerja pengampu pengelola keuangan dan pengawasan terhadap laporan keuangan.
   i. Pemerintah berkomitmen untuk selalu menyelesaikan temuan yang menjadi penghambat dalam pengelolaan keuangan.
   j. Pemerintah telah menggunakan aplikasi dalam pengelolaan keuangan terkait penerimaan dan pengeluaran.
   k. Peningkatan pendapatan daerah melalui:
      - Peningkatan kapasitas dan kompetensi pengelola penerimaan daerah.
      - Penyiapan Peraturan Daerah dan kebijakam terkait pengelolaan pendapatan
      - Peningkatan sistem perpajakan dan pengawasan pajak daerah
      - Peningkatan kesadaran wajib pajak dan memperluas basis penerimaan

Meskipun Pemerintah Kota Singkawang telah mendapatkan opini WTP laporan keuangan, tentu selalu ada masalah yang harus selalu diperhatikan dalam pencapaian kinerja indikator ini adalah sebagai berikut:

a. Masih terdapat keterlambatan dalam penetapan pendapatan yang berpengaruh dalam pelaporan keuangan.
b. Belum optimalnya aplikasi dalam pengelolaan pendapatan khususnya dalam pengelolaan piutang.
c. Masih terdapat beberapa perangkat daerah yang belum memiliki SDM yang kompeten dalam pengelolaan keuangan dan aset.
d. Masih terdapat penguasan aset oleh pihak ketiga yang belum dapat diselesaikan.
e. Masih terdapat aset tanah milik daerah yang belum bersertifikat atas nama Pemerintah Kota Ssingkawang.
f. Masih terdapat beberapa perangkat daerah yang terlambat dalam penyampaian SPJ fungsional dan laporan keuangan.
g. Masih terbatasnya SDM pengelola maupun pengawasan pendapatan daerah.
h. Kebijakan daerah terkait pengelolaan pendapatan daerah belum dilaksanakan revisi sesuai ketentuan dan peraturan terbaru,
i. Perubahan peraturan pusat terkait Undang-undang Cipta Kerja berpengaruh terhadap kebijakan didaerah.
j. Sistem perpajakan yang belum maksimal untuk mempermudah proses pelaksanaan perpajakan dan retribusi daerah.

## 11. Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas sistem pengawasan internal

### a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja

Tabel 3.32
Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | | Target | Realisasi | Capaian (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Meningkatnya Kualitas Sistem Pengawasan Internal | 1 | Maturitas SPIP | Level 3 | Level 3 | 100 |

Pada tahun 2021 maturitas SPIP mencapai target yaitu level 3. Maturitas SPIP level 3 merupakan target dari sasaran strategis meningkatnya kualitas sistem pengawasan internal.

#### 1) Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.33
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

| SASARAN STRATEGIS | PROGRAM | ANGGARAN | | | CAPAIAN KINERJA | TINGKAT EFISIENSI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TARGET (Rp) | REALISASI (Rp) | % | | |
| Meningkatnya Kualitas Sistem Pengawasan Internal | Penyelenggaraan pengawasan | 1.908.324.542 | 1.832.315.529 | 96 | 100 | 8 |
| | Perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi | 353.178.111 | 309.952.734 | 88 | | |
| **Rata – rata** | | | | **92** | **100** | **8** |

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 92 % dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 100%, maka pada sasaran ini tingkat efisiensi pelaksanaannya adalah 8 %.

#### 2) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Dalam mencapai sasaran strategismeningkatnya kualitas sistem pengawasan internal didukung melalui program yang capaiannya memenuhi 100% yaitu sebagai berikut:

1. Program penyelenggaraan pengawasan dengan capaian 100%, melalui kegiatan :
   a. Penyelenggaraan pengawasan internal, dengan sub kegiatan:
      - Pengawasan kinerja pemerintah daerah capaian 100%

- Pengawasan keuangan pemerintah daerah capaian 97%
- Revieu laporan kinerja capaian 100%
- Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP capaian 98%.

b. Penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu, dengan sub kegiatan:
   - Pengawasan dengan tujuan tertentu capaian 100%

2. Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi dengan capaian 100%, melalui kegiatan :
   a. Pendampingan, asistensi, verifikasi dan penilaian Reformasi Birokrasi capaian 100%;
   b. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi capaian 100%.
   c. Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakkan Integritas capaian 99 %.

Adapun program yang pencapaiannya belum 100% , namun mendukung pencapaian sasaran strategis antara lain:

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan, melalui Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal, dengan sub kegiatan :
   - Reviu Laporan Keuangan capaian 87%.

2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi, melalui kegiatan Pendampingan dan Asistensi, dengan sub kegiatan:
   - Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah capaian 75%.

**b. Perbandingan antara Realisasi Kinerja selama 3 Tahun dan Target Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2022**

Tabel 3.34
Perbandingan Realisasi Kinerja 2019, 2020, 2021 dan Target Akhir 2022

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TAHUN | | | TARGET RPJMD |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | |
| Meningkatnya Kualitas Sistem Pengawasan Internal | Maturitas SPIP | Level 3 | Level 3 | Level 3 | Level 3 |

Indikator kinerja Maturitas SPIP pada Tahun 2021 mencapai target yang telah ditetapkan pada dokumen RPJMD yaitu Level 3. Maturitas SPIP level 3 ini akan terus dipertahankan dan berupaya terus meningkat untuk mewujudkan sistem pengawasan internal yang berkualitas.

**c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Dilakukan**

Sasaran strategis "Meningkatnya Kualitas Sistem Pengawasan Internal" dengan indikator kinerja utama "Maturitas SPIP" dengan target Level 3 pada Tahun 2021, sebagaimana tingkat maturitas SPIP dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2021 tetap bertahan di Level 3, dengan capaian kinerja adalah 100%. Diketahui bahwa tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP didefinisikan sebagai kerangka kerja yang memuat karakteristik dasar yang menunjukkan tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP yang terstruktur dan berkelanjutan. Tingkat maturitas ini dapat digunakan paling tidak sebagai instrumen evaluatif penyelenggaraan SPIP dan panduan generik untuk meningkatkan kualitas sistem pengawasan internal.

Adapun penyebab keberhasilan dalam pencapaian kinerja sebagai berikut:

1. Konsistensi dan komitmen Wali Kota dan Kepala Perangkat Daerah terhadap penyelenggaraan SPIP,
2. dalam pengendalian intern, salah satunya dengan mengimplementasikan sebagai strategi dalam pelaksanaan program kegiatan yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mempertahankan Opini WTP.

3. Konsistensi komitmen bersama dari seluruh ASN Inspektorat Daerah Kota Singkawang untuk mempertahankan Level Maturitas SPIP sesuai dengan tugas dan fungsi yang diembannya.
4. Telah disusunnya pedoman teknis penyelenggaraan SPIP;
5. Pelaksanaan sosialisasi yang terus menerus terkait penyelenggaraan SPIP kepada Perangkat Daerah;
6. Menyusun prioritas kegiatan kegiatan pengawasan yang dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang berlaku.
7. Pemantauan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan tetap dilakukan secara berkala dimasa pandemi covid-19 dengan membatasi tatap muka, membangun komuniksi intens melalui media komunikasi dalam penyampaian bahan tindak lanjut serta melakukan pendekatan personal secara intens dengan perangkat daerah yang terdapat kerugian materil maupun aset.
8. Adanya komitmen yang tinggi dari perangkat daerah dalam penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan walaupun tidak dilaksanakan secara berkala dengan tatap muka pada masa pendemi COVID 19, akan tetapi dilakukan melalui media komunikasi lainnya.
9. Peningkatan kompetensi kapabilitas APIP.
10. Mempertahankan kualitas pengawasan di masa pandemi covid-19 dengan tetap mengedepankan pendampingan dan pembinaan terhadap perangkat daerah melalui media komunikasi, pertemuan terbatas jika dianggap urgent.
11. Reviu dokumen perencanaan secara berkala melalui sisteme-Sakip.
12. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap maturitas SPIP pada perangkat daerah yang dilakukan secara berkala.
13. Pendampingan dan konsultasi kepada Perangkat Daerah terkait manajemen resiko, pengendalian intern, tata kelola terhadap Perangkat Daerah serta yang beresiko/menghadapi kendala dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi seperti probity audit, klinik konsultasi baik Dana BOS maupun PBJ.
14. Melakukan self assessment secara berkala untuk menjaga dan memelihara Kapabilitas APIP Level 3.

15. Proaktif dalam mencari diklat kompetensi yang dilaksanakan secara daring/online.
16. Mengaktifkan pelatihan dikantor sendiri dengan narasumber dari para aparatur pemeriksa yang telah mengikuti diklat dan bimbingan teknis terkait materi pengawasan.
17. Menyediakan aplikasi Whistle Blowing System (WBS) terkait pengaduan sebagai bentuk pengendalian terhadap resiko yang kemungkinan muncul.

Meskipun telah mencapai target masih terdapat hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

a. Sehubungan dengan pandemi covid-19, mengakibatkan sebagian besar kegiatan pengawasan khususnya pemeriksaan tidak dapat dilaksanakan, sehingga sistem pengendalian intern kurang maksimal.
b. Adanya refocusing anggaran dalam mengatasi pandemi covid-19, sehingga tidak maksimal dalam capaian kinetrja di beberapa kegiatan pengawasan.
c. Tindaklanjut yang temuan hasil pemeriksaaan materiil yang mengakibatkan kerugian progres penyelesaiannya dikarenakan ada yang sudah tidak diketahui keberadaaanya, ASN yang sudah pensiun dan sudah meninggal dunia.
d. Belum seluruh ASN memahami dan melaksanakan implementasi SPIP sebagai bagian dari pengendalian intern Perangkat Daerah.

## 12. Sasaran Strategis Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

### a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja

Tabel 3.35
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | | Target | Realisasi | Capaian (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat | 1 | Angka Usia Harapan Hidup | 71,90 | 72,18 | 100,39 |

Pada sasaran strategis meningkatnya derajat kesehatan masyarakat diukur melalui indikator angka usia harapan hidup, pada

tahun 2021 ditargetkan sebesar 71,90 dan sesuai data yang dirilis oleh BPS untuk angka usia harapan hidup tahun 2021 realisasinya sebesar 72,18 sehingga capaiannya adalah 100,39%.

**1) Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Tabel 3.36
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

| SASARAN STRATEGIS | PROGRAM | ANGGARAN | | | CAPAIAN KINERJA | TINGKAT EFISIENSI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TARGET (Rp) | REALISASI (Rp) | % | | |
| Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat | Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat | 51.518.857.822 | 42.615.657.921 | 83 | 100,39 | |
| | Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan | 207.035.841 | 198.106.930 | 96 | | |
| | Sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuan | 43.894.914 | 35.167.400 | 80 | | |
| | Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan | 457.710.210 | 395.320.000 | 83 | | |
| | Pengendalian penduduk | 13.726.000 | 13.602.500 | 99 | | |
| | Pembinaan keluarga berencana | 2.533.910.895 | 1.846.867.263 | 73 | | |
| **Rata-rata** | | | | **85,66** | **100,39** | **15,22** |

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 85,66% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 100,39%, maka pada sasaran ini tingkat efisiensi mencapai 14,73%.

**2) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Terdapat 4 (empat) program yang menunjang keberhasilan dalam pencapaian pernyataan kinerja dalam sasaran strategis meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. Semua program tersebut dilaksanakan dalam kegiatan agar keberhasilan dalam upaya menaikan angka usia harapan hidup.

Program yang capaian kinerjanya 100% antara lain:

1. Program peningkatan kapasitas sumber saya manusia kesehatan capaian 100% melalui kegiatan Diklat dan uji kompetensi tenaga kesehatan yang ditunjuk dan telah memenuhi kriteria persyaratan.

2. Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman capaian 100% melalui kegiatan belanja tak terduga penanganan covid-19. Beberapa item perbekalan kesehatan mendapatkan droping dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat dan bantuan pihak ketiga yang tak mengikat terutama terkait kebutuhan perbekalan kesehatan penanganan covid-19.
3. Program pengendalian penduduk dengan capaian 100%, dengan kegiatan yang bersumber dari dana Pemerintah Pusat untuk meningkatkam usia harapan hidup.
4. Program pembinaan keluarga berencana dengan capaian 100% dengan kegiatan yang bersumber dari dana Pemerintah Pusat untuk meningkatkan usia harapan hidup.

Program kegiatan yang capaiannya tidak sampai 100% yaitu:

1. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat dengan capaian 13%.
2. Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan dengan capaian 0,34%.

**b. Perbandingan antara Realisasi Kinerja selama 3 Tahun dan Target Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2022**

Tabel 3.37
Perbandingan Realisasi Kinerja 2019, 2020, 2021 dan Target Akhir 2022

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TAHUN | | | TARGET RPJMD |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | |
| Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat | Angka Usia Harapan Hidup | 71,85 | 72,06 | 72,18 | 72 |

Berdasarkan tabel diatas angka usia harapan hidup setiap tahunnya mengalami peningkatan. Dengan target akhir RPJMD tahun 2022 adalah sebesar 72 maka di tahun 2021 target tersebut sudah melampaui dan diharapkan Pemerintah Kota Singkawang terus berkomitmen untuk meningkatkan angka usia harapan hidup untuk menjadi semakin baik.

**c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Dilakukan**

Strategi dalam pencapaian indikator angka usia harapan hidup yang telah melebihi pencapaian target yaitu :

a. Sinergisitas dalam menyusun dan melaksanakan program kegiatan di tingkat Kota, Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana hingga UPT Puskesmas.
b. Penyusunan program, kegiatan/sub kegiatan yang lebih sensitive, alikatif, tepat dan memiliki daya ungkit yang signifikan dalam rangka pencapaian target indikator kinerja.
c. Penyuluhan kelas ibu hamil yang dilakukan secara rutin oleh petugas puskesmas di puskesmas dan posyandu.
d. Bagi kasus ibu yang terindikasi KEK dilaksanakan program tambahan makanan melalui petugas kesehatan di puskesmas dan posyandu.
e. Melakukan audit maternal terhadap kasus kematian ibu.
f. Pemerintah Kota Singkawang telah menyiapkan anggaran bagi masyarakat kurang mampu yang tidak terdaftar dalam jaminan kesehatan masyakat mandiri sebanyak 23.000 jiwa.
g. Untuk kasus bayi dengan lahir berat badan kurang selalu diberi perhatian khusus oleh petugas puskesmas.
h. Peningkatan kegiatan pemantuan secara rutin (pemantuan status gizi) bagi seluruh bayi di Posyandu.
i. Kegiatan sweeping di rumah-rumah penduduk yang terdata mempunyai bayi.
j. Menggalakan program gerakan masyrakat dengan pola hidup sehat pada seluruh puskesmas.
k. Menggalakan program jumantik (satu rumah satu kader jumantik) sehingga kasus DBD menurun.

Meskipun capaian target telah melampaui target, masih terdapat hambatan dalam pencapaian strategis ini adalah sebagai berikut :

a. Adanya refocusing anggaran dalam mengatasi pandemi covid-19, sehingga berdampak pada beban kerja yang sangat tinggi.

b. Dampak pandemi covid19 tahun 2021, mengakibatkan beberapa refocusing anggran yang berdampak pada pelaksanaan kegiatan.
c. Kurangnya jumlah dan kompetensi SDM Kesehatan di lapangan.
d. Belum optimalnya manajemen perencanaan kesehatan.
e. Lemahnya dukungan dari tokoh masyarakat, tokoh agama dan peran serta pihak sekolah tentang pentingnya imunisasi.
f. Lemahnya kesadaran masyarakat dalam usaha preventif kesehatan.
g. Kebijakan pelaksanaan program dan kegiatan antara bidang dan pengelola program di Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Singkawang belum semuanya bersinergi.
h. Peran serta semua elemen yang ada di Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Singkawang terhadap program dan kegiatan kesehatan masih belum optimal, termasuk di UPT Dinas (Puskesmas) yang merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

## 13. Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas pendidikan

### a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja

Tabel 3.38
Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | | Target | Realisasi | Capaian (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Meningkatnya Kualitas Pendidikan | 1 | Angka Rata-rata Lama Sekolah | 7,95 | 7,9 | 99,37 |
| | | 2 | Angka Harapan Lama Sekolah | 12,91 | 12,9 | 100,00 |
| **Rata-rata capaian** | | | | | | **99,69** |

Pada sasaran strategis meningkatnya kulitas pendidikan dirumuskan melalui indikator rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah. Hasil rilis data BPS Tahun 2021 angka rata-rata lama sekolah ditargetkan sebesar 7,95 dan realisasinya adalah 7,90 sehingga capaiannya menjadi 99,37%. Sedangkanangka harapan lama sekolah yang ditargetkan 12,9, tahun 2021 ini mencapai 12,9 sehingga capaian menjadi 100,00%. Dari kedua indikator ini rata-rata capaian pada sasaran strategis ini adalah 99,69%.

### 1) Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.39
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

| SASARAN STRATEGIS | PROGRAM | ANGGARAN | | | CAPAIAN KINERJA | TINGKAT EFISIENSI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TARGET (Rp) | REALISASI (Rp) | % | | |
| Meningkatnya Kualitas Pendidikan | Pengelolaan Pendidikan | 102.159.567.061 | 98.900.211.339 | 96,81 | 99,69 | n/a |
| **Rata - rata** | | | | **96,81** | **99,69** | **n/a** |

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 96,81% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 99,69 %, maka pada sasaran ini tidak terdapat tingkat efisiensi penggunaan sumber dayanya.

### 2) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Dalam mencapai sasaran meningkatnya kualitas pendidikan dengan indikator angka harapan lama sekolah, hanya terdapat 1 (satu) program yang menunjang dalam pencapaian sasaran ini yaitu Program Pengelolaan Pendidikan, dengan kegiatan:

a. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utulitas Sekolah;
b. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas;
c. Rehabikitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah;
d. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah;
e. Pengadaan Mebel Sekolah;
f. Pengadaan perlengkapan sekolah;
g. Pengadaan perlengkapan siswa;
h. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa;
i. Pembangunan Laboratorium Sekolah.

Dalam mencapai sasaran meningkatnya kualitas pendidikan dengan indikator angka rata-rata lama sekolah, hanya terdapat 1 (satu) program yang menunjang dalam pencapaian sasaran ini yaitu Program Pengelolaan Pendidikan, dengan kegiatan:

a. Penyiapan tindak lanjut evaluasi satuan pendidikan dasar;

b. Pengelolaan dana BOS sekolah dasar;
c. Penyelenggaraan proses belajar dan ujian bagi peserta didik;
d. Pengelolaan dana BOS sekolah menengah pertama;
e. Pengelolaan dana BOP PAUD;
f. Pengelolaan Pendidikan non Formal/Kesetaraan

**b. Perbandingan antara Realisasi Kinerja selama 3 Tahun dan Target Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2022**

Tabel 3.40
Perbandingan Realisasi Kinerja 2019, 2020, 2021 dan Target Akhir 2022

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TAHUN | | | TARGET RPJMD |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | |
| Meningkatnya Kualitas Pendidikan | Angka Rata-rata Lama Sekolah | 7,72 | 7,89 | 7,90 | 8,12 |
| | Angka Harapan Lama Sekolah | 12,89 | 12,9 | 12,91 | 12,93 |

Dalam 3 (tiga) tahun terakhir pencapaian sasaran strategis meningkatnya kualitas pendidikan yang diukur melalui indikator angka rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah selalu meningkat namun masih belum melampaui target pada akhir masa RPJMD.

**c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Dilakukan**

1. Indikator angka rata-rata lama sekolah dipengaruhi oleh data penduduk tamat sekolah pada jenjang SD, SMP dan SMA. Indikator rata-rata lama sekolah belum dapat mencapai target (99,37%), dipengaruhi oleh:
   a. Masih terdapat angka putus sekolah terutama pada jenjang SMP disebabkan oleh faktor ekonomi serta lemahnya kesadaran orang tua terhadap pendidikan anak.
   b. Aksesibilitas pada wilayah tertentu yang masih sulit untuk dijangkau.
   c. Kebutuhan guru masih belum tercukupi teruma untuk guru kelas.
   d. Masa pandemi covid19, sangat mempengaruhi permasalahan dalam pelaksanaan sekolah

Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi masalahm terutama dalam masa pandemi covid19 antara lain:

a. Adanya bantuan pendidikan yaitu bantuan operasional sekolah jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama sehingga sangat membantu dalam operasional sekolah siswa;
b. Program beasiswa bagi masyarakat miskin mulai tingkat SD sampai SMP.
c. Memberikan bantuan kelengkapan kepada siswa disekolah pinggiran.
d. Meningkatkan peran guru BK kepada siswa bermasalah.
e. Menyiapkan ketersediaan guru kelas dalam meningkatkan proses belajar mengajar sehingga mengurangi angka tidak naik kelas.
f. Melakukan perubahan metode belajar (baik secara daring, pembentukan kelompok belajar, pendekatan jemput bola pembelajaran bagi siswa yang tidak dapat memenuhi pembelajaran secara daring);
g. Pemerintah menyiapkan angkutan sekolah bagi siswa pinggiran.
h. Pemerintah menyiapkan program pendidikan kesetaraan bagi siswa yang di kelola oleh masyarakat.
i. Pemerintah menyiapkan atau menambah unit sekolah baru dan fasilitias pendukungnya.
j. Pemerintah telah menyiapkan sekolah filial (cabang sekolah yang dipersiapkan/diperbantukan pada sekolah induk), untuk daerah yang masih belum terjangkau oleh penduduk
k. Peran penilik sekolah yang cukup aktif dalam pembinaan kesadaran masyarakat dalam pendidikan.

2. Indikator angka harapan lama sekolah hampir mencapai target yaitu 100,00%. Angka harapan lama sekolah dipengaruhi oleh lamanya siswa dalam menempuh pendidikan sekolah pada tiap jenjang. Indikator angka harapan lama sekolah mencapai target, dipengaruhi oleh :

a. Masih terdapat siswa yang pindah/melanjutkan pendidikan ke kota lain sehingga berpengaruh terhadap angka lama sekolah.
b. Faktor ekonomi yang menyebabkan putus sekolah siswa pada tingkat tertentu.

Upaya yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Singkawang untuk memenuhi capaian kinerja pada indikator angka harapan lama sekolah antara lain:

a. Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan hingga tingkat tertentu dan pada wilayah yang berada di pinggiran.
b. Peran Pemerintah Pusat dalam pemberian dana BOS.
c. Memenuhi kebutuhan guru melalui pengangkatan tenaga kontrak dan mengusulkan formasi CPNS.
d. Pemerintah Kota Singkawang telah menyediakan layanan pendidikan hingga perguruan tinggi .
e. Melakukan sinergisitas dengan pihak masyarakat/swasta dalam memenuhi sekolah swasta pada jenjang tertentu.
f. Memberikan bantuan kepada siswa berprestasi untuk meningkatkan kualifikasi pendidikan pada tingkat yang lebih tinggi.

Meskipun telah memenuhi target, namun masih banyak permasalahan yang dihadapi antara lain:

a. Masih terdapat angka putus sekolah terutama pada jenjang SMP disebabkan oleh faktor ekonomi serta lemahnya kesadaran orang tua terhadap pendidikan anak.
b. Aksesibilitas pada wilayah tertentu yang masih sulit untuk dijangkau.
c. Kebutuhan guru masih belum tercukupi teruma untuk guru kelas.

## 14. Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Dasar

Tabel 3.41
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | | Target | Realisasi | Capaian (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | **Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Dasar** | 1 | Persentase Jalan mantap (%) | 62 | 58,67 | 94,63 |
| | | 2 | Persensentase penduduk berakses air minum (%) | 65 | 73,17 | 112,57 |
| | | 3 | Persentase rumah layak huni | 91,75 | 91,42 | 99,64 |
| | | 4 | Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang ditangani (%) | 85,34 | 52,2 | 61,17 |
| **Rata-rata capaian** | | | | | | 92,00 |

Pada sasaran meningkatnya kualitas infrastruktur dasar terdiri dari 4 (empat) indikator. Indikator pertama adalah persentase jalan mantap dengan target tahun 2021 adalah 62% terealisasi sebesar 58,67% dengan capaian adalah 94,63%

Indikator kedua yaitu persensentase penduduk berakses air minum terealisasi 73,17 % dari target 65% sehingga capaian kinerjanya sebesar 112,57%

Indikator ketiga adalah persentase rumah layak huni dengan target tahun 2021 sebesar 91,75% terealisasi sebesar 91,42% dengan capaian kinerja sebesar 99,64%.

Indikator terakhir yaitu luas kawasan permukiman kumuh yang ditargetkan 85,34 pada tahun 2021 hanya terealisasi sebesai 52,2 % sehingga capaian kinerja hanya sebesar 61,17%.

### 1) Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.42
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

| SASARAN STRATEGIS | PROGRAM | ANGGARAN | | | CAPAIAN KINERJA | TINGKAT EFISIENSI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TARGET (Rp) | REALISASI (Rp) | % | | |
| Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Dasar | Penyelenggaraan jalan | 151.008.540.169 | 142.225.852.158 | 94,18 | 92 | |
| | Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum | 7.451.812.898 | 6.518.827.834 | 87,48 | | |
| | Pengembangan perumahan | 295.662.254 | 51.565.500 | 17,44 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum | 19.422.072.801 | 18.717.655.014 | 96,37 | | |
| | Kawasan permukiman kumuh | 2.637.018.630 | 2.617.547.880 | 99,26 | | |
| | Kawasan Permukiman | 1.351.916.650 | 1.328.356.000 | 98,26 | | |
| **Rata-rata** | | | | **82,17** | **92** | **n/a** |

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 82,17 % dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 92 %, maka pada sasaran ini tingkat efisiensi penggunaan sumber dayanya masih belum efisien dikarenakan capaian kinerjanya belum mencapai 100%.

**2) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Dalam pencapaian sasaran, terdapat 4 program yang menunjang. Program yang menunjang pencapaian sasaran target pada tiap indikator yaitu:

1. Program penyelenggaraan jalan kabupaten/kota dengan capaian 94,63% untuk indikator persentase jalan mantap, dilaksanakan melalui kegiatan penyelenggaraan jalan dengan sub kegiatan pembebhasan lahan, survey kondisi jalan, pengeloaan leger jalan, pembangunan jalan, rekonstruksi jalan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan, pembangunan dan pemeliharaan jembatan :
2. Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum untuk indikator persentase penduduk berakses air minum, dilaksanakan melalui kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum di daerah dan sub kegiatan peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perkotaan.
3. Untuk mencapai indikator persentase rumah layak huni dengancapaian 99,64 %, dilaksanakan melalui program:
   a. Program Pembangunan perumahan dengan capaian program, melalui kegiatan/sub kegiatan:
      - Peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha, capaian 62,15%
      - Perbaikan rumah tidak layak huni

b. Program Kawasan Permukiman Kumuh dengan capaian, melalui kegiatan/sub kegiatan:
   - Pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota, capaian 62,15%;
   - Rehabilitasi rumah korban bencana
   - Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan;
   - Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian dan pembangunan dan pengembangan perumahan

c. Program Peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum, dengan capaian 99,31%, melalui kegiatan/sub kegiatan:
   - Penyelenggraan PSU perumahan;
   - Penyediaaan prasarana, sarana dan utilitas umum di perumahan untuk menunjang fungsi hunian;
   - Koordinasi dan sikronisasi dalam rangka penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan

4. Program kawasan permukiman untuk pencapaian indikator luas kawasan permukiman kumuh, dengan capaian 52,20%, dilaksanakan melalui kegiatan/sub kegiatan :
   - Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman
   - Penyusunan dan/atau review serta legalisasi rencana pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dan permukiman kumuh
   - Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha
   - Survey dan penetapan lokasi perumahan dan permukiman kumuh;
   - Peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha;
   - Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian penylenggaraan pemugaran/peremajaan permukiman kumuh;

- Pelaksanaan pembangunan pemugaran / peremajaan permukiman kumuh.

**d. Perbandingan antara Realisasi Kinerja selama 3 Tahun dan Target Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2022**

Tabel 3.43
Perbandingan Realisasi Kinerja 2019, 2020, 2021 dan target akhir 2022

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TAHUN | | | TARGET RPJMD |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | |
| Meningkatnya kualitas infrastruktur | Persentase Jalan mantap (%) | 55,14 | 53,54 | 58,67 | 62,30 |
| | Persensentase penduduk berakses air minum (%) | 39,74 | 39,17 | 73,17 | 75,00 |
| | Persentase rumah layak huni | 90,51 | 91,17 | 91,42 | 92,25 |
| | Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang ditangani (%) | 84,68 | 88,73 | 52,2 | 85,67 |

Untuk penanganan jalan mantap ini ditangani oleh 2 (dua) Perangkat Daerah yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Dinas Permukiman, Perumahan dan Pertanahan untuk penanganan jalan lingkungan.

Pengelolaan jalan mantap oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana berikut:

| Uraian | Tahun | | |
|---|---|---|---|
| | 2019 | 2020 | 2021 |
| Panjang jalam dalam kondisi baik | 244.078 | 236.961 | 259.683 |
| Panjang jalan seluruhnya | 442.618 | 442.618 | 442.618 |
| Persentase jalan mantap | 55,14 | 53,54 | 58,67 |

Pengelolaan jalan mantap oleh Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan sebagaimana berikut:

| Uraian | Tahun | | |
|---|---|---|---|
| | 2019 | 2020 | 2021 |
| Panjang jalam dalam kondisi baik | 227,32 | 235,51 | 245,83 |
| Panjang jalan seluruhnya | 441,62 | 441,62 | 441,62 |
| Persentase jalan mantap | 51,47 | 53,33 | 55,67 |

Persentase penduduk berakses air minum dari tahun 2019 dan hingga tahun 2021 mengalami kenaikan sebagaimana data berikut:

| Uraian | Tahun | | |
|---|---|---|---|
| | 2019 | 2020 | 2021 |
| Jumlah penduduk berakses air minum | 87.065 | 93.405 | 175.171 |
| Jumlah penduduk | 219.061 | 237.429 | 239.377 |
| Persentase penduduk berakses air minum | 39,74 | 39,34 | 73,178 |

Jumlah seluruh rumah layak huni mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 sebanyak 48.909 rumah, tahun 2020 sebanyak 49.363 dan tahun 2021 sebanyak 49.604 rumah. Sehingga persentase rumah layak huni hingga akhir tahun 2021 mencapai 91,42%.

Luasan permukiman yang tertangani menunjukkan angka yang menurun pada tahun 2021 karena meningkatnya jumlah pemukiman kumuh yang ditetapkan sebagaimana data berikut:

| Uraian | Tahun | | |
|---|---|---|---|
| | 2019 | 2020 | 2021 |
| Luas permukiman kumuh yang tertangani | 62,69 | 65,69 | 69,22 |
| Jumlah pemukiman kumuh yang ditetapkan | 74,03 | 74,03 | 132,60 |
| Luas kawasan permukiman kumuh (%) | 84,68 | 88,73 | 52,20 |

**e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Dilakukan**

1. Indikator Persentase Jalan mantap hanya mencapai target 53,54%, hal ini disebabkan :
   a. Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan terlambat yaitu di mulai bulan Juli sebagai bagian dari proses perencanaan yang bergeser;
   b. Pergeseran dan rasionalisasi anggaran karena refocusing untuk penanganan pandemi covid 19;

c. Pelaksanaan kegiatan APBD perubahan terlambat, sehingga masa pelaksanaan kegiatan fisik tidak cukup waktu;
d. Terjadinya permasalahan dalam hal pembebasan lahan.
e. Banyaknya kondisi ruas jalan yang mengalami rusak ringan/rusak berat tidak dapat terpenuhi permintaan secara tuntas dalam satu ruas.
f. Belum tersedianya database terhadap kondisi jalan dan jembatan yang update.
g. Curah hujan yang cukup tinggi, sehingga penyedia cukup sulit untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu dan kesulitan mendatangkan mobilisasi alat/material.

Dalam mengatasi hambatan tersebut, dilakukan upaya sebagai berikut:

a. Melakukan sosialisasi dan negosiasi yang intensif kepada masyarakat pemilik lahan, sekaligus penyuluhan kepada masyarakat pentingnya jalan bagi kepentingan umum.
b. Menyusun program/kegiatan yang tepat sasaran, sehingga kondisi ruas jalan yang mengalami rusak ringan/rusak berat dapat dilakukan perbaikan sesuai dengan data yang aktual.

2. Indikator Persentase penduduk berakses air minum melebihi target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 112,58% hal ini dikarenakan :
   a. Melakukan pendekatan dengan masyarakat, melalui sosialisasi akan pentingnya menjaga sumber air baku; dan
   b. Melakukan peremajaan dan meningkatkan infrastruktur jaringan air bersih pada kawasan yang belum terjangkau; dan

   Dalam palaksanaan pencapaian pasti mengalami banyak hambatan antara lain sebagaimana berikut:

   a. Adanya refocusing anggaran dalam mengatasi pandemi covid-19, sehingga pengadaan jaringan air bersih tidak mencukupi untuk merealisasikan sesuai perencanaan.

b. Adanya curah hujan cukup tinggi, sehingga kesulitan dalam proses pekerjaan dikarenakan lokasi pekerjaan berada pada bukit/gunung.
c. Kekurangan sumber air baku.
d. Adanya perubahan diameter pipa, dari pipa besar ke diameter pipa kecil, sehingga terdapat penambahan panjang realisasi kinerjanya.
e. Belum optimalnya pelayanan distribusi air yang mempengaruhi minat masyarakat terhadap penyediaan air.
f. Masih terdapat budaya masyarakat yang masih menggunakan sumber air tanah.
g. Menurunnya kualitas dan kuantitas air baku.
h. Pemerintah Kota belum dapat menyiapkan jaringan pipa distribusi induk dan tersier pada wilayah permukiman penduduk.

3. Indikator Persentase rumah layak huni belum dapat mencapai target yang telah ditetapkan, hal ini dikarenakan :
   a. Pada tahun 2021 tidak ada Peristiwa kejadian bencana (bencana alam) di Kota Singkawang yang di tetapkan oleh surat Keputusan Kepala Daerah (sesuai ketentuan peraturan yang berlaku). sehingga penyerapan anggaran dan capaian tidak maksimal sebesar 46,15%. Penanganan rumah bagi korban bencana pada tahun 2021 mengacu pada Surat Keputusan Walikota Singkawang Nomor: 653/409/Perkimta.Perum-A/Tahun 2021, Tentang Penerima Bantuan Bahan Bangunan Bagi Korban Bencana Kebakaran, realisasi sejumlah 6 unit rumah/Kepala keluarga, namun masuk kategori kegiatan rutin karena Kebakaran rumah akibat konsleting listrik (human error) dan merupakan peristiwa kejadian non alam sehingga tidak dapat dihitung ke dalam capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat.
   b. Masih kurangnya swadaya masyarakat berpenghasilan rendah untuk membangun rumah layak dan sehat, serta pertambahan jumlah penduduk setiap tahunnya namun tidak seiring dengan bertambahya jumlah rumah layak huni.

c. Persentase Rumah Layak Huni tercapai 91,42% dan masih terdapat rumah tidak layak huni di Kota Singkawang dengan prosentase 2,08%. Masih terdapat 1.130 unit rumah tidak layak huni perlu direhabilitasi menjadi rumah layak huni berdasarkan data usulan yang terverifikasi tahun 2021.
d. Belum tersedianya database perumahan yang update dan valid terutama pada rencana pengembangan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman (RP3KP) yang merupakan salah satu dokumen *masterplan* (Rencana Induk).
e. Kurangnya data Pendukung yang valid terutama data base inventarisasi Prasarana Sarana dan Utillitas umum (PSU) diantaranya Perumahan permukiman yang terfasilitasi PSU sehingga menyulitkan dalam penyediaan data untuk Pemanfaatan Dokumen Perencanaan Sarana dan Prasarana Dasar (PSD) serta Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Dilingkungan Perumahan Permukiman.

Upaya pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala tersebut, adalah :

a. Menyiapkan anggaran untuk penanganan rehabilitasi rumah korban bencana setiap tahun pada Program Pengembangan Perumahan dengan Sub kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana dan Sub Kegiatan Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana. Ini merupakan antisipasi terhadap kejadian bencana pada tahun berjalan serta dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan Rakyat.
b. Menyiapkan kebijakan untuk Penanganan rumah bagi korban bencana;
c. Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat terhadap pentingnya membangun rumah yang layak dan sehat secara swadaya.. Pemerintah Kota Singkawang memperoleh program ini melalui Cadangan Dana Alokasi Khusus (DAK) Jenis Reguler Sub Bidang perumahan dan Permukiman sebesar Rp. 2.443823.000,- dengan rincian :

- Bantuan stimulan peningkatan kualitas rumah swadaya, termasuk upah tukang sebesar Rp 2.380.000.000,-. Target penanganan RTLH sejumlah 119 unit (Rp 20.000.000 per unit) yang tersebar di 3 kecamatan (59 unit rumah di Singkawang Selatan, 30 unit rumah di Singkawang Timur dan 30 unit rumah di Singkawang Tengah).
- Pemerintah Kota Singkawang melalui DISPERKIMTA menganggarkan biaya penunjang/biaya operasional (BOP) sebesar Rp. 193.195.630,-.
- Pada Tahun 2021 adanya bantuan penanganan RTLH dari anggaran APBN melalui/dilaksanakan oleh SNVT Provinsi Kalimantan Barat sejumlah 51 Unit yang tersebar di 2 Kecamatan (29 unit rumah di Singkawang Utara, dan 22 unit rumah di Singkawang Selatan).

d. Memprioritaskan penanganan rumah tidak layak huni melalui Bantuan Stimulan Rumah dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bantuan Stimulan Rumah Swadaya (BSRS) sebagai program tetap, berkelanjutan dan berkesinambungan hingga tuntas kota dari RTLH, guna meningkatkan kualitas rumah sehat, sederhana dan layak huni dalam rangka Perbaikan kualitas Perumahan/Rumah bagi masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Pada tahun 2021 telah mengajukan usulan sejumlah 1.130 Unit Rumah RTLH yang terverifikasi dalam usulan agar dapat diakomodir oleh Pemerintah Pusat untuk menjadi prioritas penanganan pada tahun 2022.

e. Mengupayakan usulan anggaran kegiatan penyusunan/updating dan Reviu Rencana Pengembangan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) pada Tahun 2022 dalam rangka penyediaan kebutuhan data perumahan dan rencana induk.

f. Mengupayakan Kegiatan Penyusunan Dokumen Data Base/ inventarisasi Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang dianggarkan melalui APBD Kota Singkawang pada tahun anggaran berikutnya dan meningkatkan koordinasi dengan Dinas,

Badan yang terkait serta meningkatkan intensitas Peninjauan Lapangan dalam upaya mendapatkan data yang Akurat.

4. Indikator luas kawasan permukiman kumuh belum mencapai target yang telah ditetapkan, hal ini dikarenakan :
   a. Review baseline kawasan permukiman kumuh yang ditetapkan melalui SK Wali Kota No. 600/294/DISPERKIMTA.PERKIM-A TAHUN 2020 tentang Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh seluas 58,57 Ha, mengakibatkan penambahan luasan kawasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebesar 132,60 Ha. Berdasarkan SK tersebut, sejumlah 58,57 ha (0,11 %) dari luas wilayah Kota Singkawang sebesar 50.400 Ha/504 Km2. Sampai dengan tahun 2021 luasan perumahan dan permukiman kumuh di Kota Singkawang yang tertangani sejumlah 3,53 Ha (6,02 %) dan masih terdapat sebesar 55,04 ha atau 93,97 % yang belum tertangani.
   b. Penetapan target dalam tahun 2021 sebesar 85,34 % dirasakan cukup tinggi dengan adanya penambahan luasan perumahan dan permukiman kumuh.
   c. Anggaran yang tersedia untuk penangan perumahan dan permukiman kumuh cukup besar jika memperhatikan target yang tertuang dalam RPJMD serta memperhatikan realisasi capaian hingga tahun 2021 yang baru tercapai sebesar 52,2%.

Upaya pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala tersebut, adalah :

a. Melakukan pemetaan dan pendataan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh, mengusulkan pendanaan yang bersumber dari APBN (Promenade II) dan APBD (7 paket pembangunan dan peningkatan jalan) di lokasi permukiman kumuh sesuai SK Wali Kota Singkawang Tahun 2020
b. Melakukan revieu terhadap kebijakan penetapan lokasi pemukiman dan perumahan kumuh yaitu dengan penetapan SK Wali Kota Singkawang No. 600/294/DISPERKIMTA.PERKIM-A TAHUN 2020

tentang Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh seluas 58,57 Ha.

c. Penanganan Perumahan dan permukiman kumuh menjadi prioritas dalam program pembangunan tingkat daerah maupun pusat yang akan dilaksanakan secara terpadu dan berkelanjutan terutama Prasarana dan Sarana dasar (PSD) dan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan Permukiman Kumuh sehingga menjadi lingkungan hunian yang layak, sehat, aman dan Produktif.

d. Melakukan revisi/penyesuaian target rencana penanganan Luasan Permukiman Kumuh pada dokumen perencanaan strategis Renstra dan RPJMD dengan memperhatikan capaian Kinerjanya.

## 15. Sasaran Strategis Menurunnya Kawasan Genangan Banjir

Tabel 3.47
Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | | Target | Realisasi | Capaian (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Menurunnya Kawasan Genangan Banjir | 1 | Luas Kawasan Genangan Banjir | 2.180 | 2.047 | 93,40 |

Pada sasaran menurunnya kawasan genangan banjir dengan indikator luas kawasan genangan banjir dengan target 2.180 Ha, realisasi target 2021 sebesar 2.047 ha, dengan capaian sebesar 93,90%.

### 1) Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.48
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

| SASARAN STRATEGIS | PROGRAM | ANGGARAN | | | CAPAIAN KINERJA | TINGKAT EFISIENSI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TARGET (Rp) | REALISASI (Rp) | % | | |
| Menurunnya Kawasan Genangan Banjir | Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase | 10.313.785.510 | 9.988.256.706 | 96,84 | 93,90 | |
| | Pengelolaan sumber daya air | 48.291.820.972 | 46.275.659.555 | 95,83 | | |
| | | | | 96,34 | 93,90 | n/a |

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 96,34% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 93,90%, maka tidak terdapat tingkat efisiensi pelaksanaan karena capaian kinerja belum mencapai 100%.

**2) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Dalam upaya mencapai sasaran strategis menurunnya kawasan genangan banjir Pemerintah Kota Singkawang, program kegiatan yang mendukung dalam pencapaian kinerja yaitu sebagai berikut:

- Program pengelolaan dan pengembangan system drainase melalui kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah kabupaten/kota, melalui sub kegiatan pengembangan sistem drainase perkotaan, rehabilitasi saluran drainase perkotaan dan operasi dan pemeliharaan sistem drainase.
- Program pengelolaan sumber daya air, melaluimkegiatan pengelolaan SDA dan bangunan pantai pada wilayah sungai dalam satu daerah kabupaten/kota melalui sub kegiatan pembangunan embung dan penampungan air lainnya, pembangunan bangunan perkuatan tebing, pembangunan polder/kolam retensi, rehabilitasi embung dan penampungan air lainnya serta normalisasi sungai.

**b. Perbandingan antara Realisasi Kinerja selama 3 Tahun dan Target Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2022**

Tabel 3.49
Perbandingan realisasi kinerja 2019, 2020, 2021 dan target akhir 2022

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TAHUN | | | TARGET RPJMD |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | |
| Menurunnya Kawasan Genangan Banjir | Luas Kawasan Genangan Banjir | 4.408 | 2.198 | 2.047 | 2.170 |

Luas kawasan genangan banjir, pada tahun 2019 seluas 4.408 Ha, pada tahun 2020 mengalami penurunan luasan genangan banjir yang cukup besar yaitu seluas 2.198 Ha dan pada tahun 2021 juga mengalami penurunan sebesar 2.047 Ha. Luas genangan banjir merupakan

perbandingan antara luas kawasan genangan banjir berbanding dengan luas wilayah kota Singkawang yaitu seluas 50.400 Ha. Sudah melebihi dari target pada RPJMD.

**c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Dilakukan**

Indikator luas kawasan genangan banjir masih belum mencapai target yang ditetapkan, hal ini disebabkan oleh :

1. Adanya refocusing anggaran dalam mengatasi pandemi covid-19, sehingga kegiatan pembangunan turap/talud bronjong tidak mencukupi untuk merealisasikan sesuai perencanaan.
2. Adanya penolakan dari masyarakat untuk dibangun drainase dilahan miliknya.
3. Sungai dan saluran primer untuk pengendalian banjir mengalami pendangkalan.
4. Permukiman warga yang terlalu dekat dengan jalan sehingga sulit dilakukan pembangunan saluran dan mengatur dimensi saluran sesuai kebutuhan
5. Terdapat bangunan yang berada pada tepi tebing sungai/saluran.
6. Pekerjaan kegiatan pada APBD dimulai agak terlambat yaitu pada bulan Juli.

Dalam penanganan kawasan genangan banjir, dilakukan upaya sebagai berikut :

1. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang batas-batas wilayah sungai serta pentingnya pemeliharaan lingkungan
2. Sinergisitas program antar perangkat daerah dalam mengatasi permasalahan banjir
3. Adanya pendekatan kepada masyarakat pada sekitar lokasi turap/talud/bronjong sungai untuk tidak menutup atau memperkecil saluran.
4. Melakukan kegiatan normalisasi/pembersihan sungai secara berkala.

5. Melakukan kegiatan untuk peningkatan fungsi drainase melalui anggaran yang bersumber dari pihak swasta maupun Pemerintah Pusat;

## 16. Sasaran Strategis Meningkatnya Daya Saing Sektor Perdagangan

### a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja

Tabel 3.50
Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | | Target (Rp) | Realisasi (Rp) | Capaian (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Meningkatnya Daya Saing Sektor Perdagangan | 1 | Volume Usaha Perdagangan | 1.621.701.998.595 | 1.547.104.200.000 | 95,40 |

Pada sasaran meningkatnya daya saing sektor perdagangan dengan indikator volume usaha perdagangan target tahun 2021 adalah Rp.1.621.701.998.595 realisasinya adalah Rp. 1.547.104.200.000 dengan capaina kinerja sebesar 95,40 %.

#### 1) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.51
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

| Sasaran Strategis | Program | Anggaran | | | Capaian Kinerja | Tingkat Efisiensi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Target (Rp) | Realisasi (Rp) | % | | |
| Meningkatnya Daya Saing Sektor Perdagangan | Peningkatan sarana distribusi perdagangan | 3.168.324.294 | 2.327.828.890 | 73,47 | 95,40 | |
| | Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting | 517.311.220 | 439.295.100 | 84,92 | | |
| | Standarisasi dan perlindungan konsumen | 37.700.330 | 36.869.000 | 97,79 | | |
| **Rata-rata** | | | | **75,31** | **95,40** | **n/a** |

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 75,31 % dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 95,40%, maka tidak diperoleh tingkat efisiensi pelaksanaan pencapaian sasaran.

**2) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Adapun program kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategi sebagai berikut:

a. Program peningkatan sarana distribusi perdagangan, capaian 100%, melalui kegiatan:
   1. Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan capaian 100%.
   2. Pembinaaan terhadap pengelolaa sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilyah kerjanya

b. Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting capaian 100%, melalui kegiatan:
   1. Pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok da barang penting di tingkat pasara kabupaten/kota capaian 100%.

c. Program standarisasi dan perlindungan konsumen capaian 100%, melalui kegiatan:
   1. Pelaksanaan metrology legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan

**b. Perbandingan antara Realisasi Kinerja selama 3 Tahun dan Target Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2022**

Tabel 3.52
Perbandingan realisasi kinerja 2019, 2020, 2021 dan target akhir 2022

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TAHUN | | | TARGET RPJMD |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | |
| Meningkatnya Daya Saing Sektor Perdagangan | Volume Usaha Perdagangan | 1.516.260.200.000 | 1.402.154.400.000 | 1.547.104.200.000 | Rp.1.702.787.098.525 |

Volume usaha perdagangan tahun 2021 menunjukan peningkatan dari Tahun 2020. Hal ini sangat dipengaruhi oleh bencana akibat pandemi covid. Capaian realisasi Tahun 2021 belum mampu mencapai dari target RPJMD yang telah ditetapkan. Harapan kedepannya pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan capaian kinerja dari sasaran ini.

**c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Dilakukan**

Indikator volume usaha perdagangan belum dapat memenuhi target, hal ini disebabkan :

1. Peningkatan omset pelaku usaha perdagangan yang relative kecil karena menghadapi situasi dampak pandemi covid19;
2. Masih rendahnya kualitas manajemen pengelolaan usaha perdagangan skala mikro kecil.
3. Tingginya biaya distribusi barang perdagangan yang mengakibatkan kenaikan harga barang, sedangkan daya beli masyarakat menurun sebagai dampak pandemi covid19.
4. Kelemahan pelaku usaha dalam peluang besar dan memperbesar pangsa pasar.
5. Unit usaha relative sulit dalam mengaplikasikan perkembangan teknologi baru untuk meningkatkan daya saing produk yang dihasilkan, khususnya dalam hal pemasaran produk melalui elektronik.

Beberapa upaya yang telah dilakukan pemerintah yang akan berpengaruh terhadap peningkatan volume usaha perdagangan, antara lain:

1. Mendorong pelaku usaha perdagangan untuk berinovasi dalam memperoleh peluang pasar khususnya dalam hal pemasaran produk melalui media elektronik.
2. Memberikan pelatihan kepada pelaku usaha perdagangan tentang manajemen usaha.
3. Meningkatkan pengawasan distribusi barang perdagangan dan memperkuat kebijakan pemerintah dalam mengendalikan harga barang.
4. Pemerintah membangun suatu inovasi pemasaran perdagangan dalam suatu aplikasi MBS, yang membantu untuk memasarkan produk perdagangan yang ada diseluruh kota Singkawang .

5. Pemerintah berupaya menjaga kenaikan tingkat inflasi dan stabilitas harga yaitu dengan selalu melakukan pemantauan harga barang kebutuhan pokok baik ditingkat agen hingga pedagang pengecer, serta melakukan pemantauan stok barang kebutuhan pokok bersama satgas pangan.

## 17. Sasaran Strategis Berkembangnya Sektor Pariwisata

### a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja

Tabel 3.53
Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | | Target | Realisasi | Capaian (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Berkembangnya Sektor Pariwisata | 1 | Jumlah Kunjungan Wisata | 353.020 | 642.114 | 181.89 |
| | | 2 | Rata-Rata Lama Tinggal | 1,14 | 2 | 175,44 |
| | | Rata-rata | | | | 178,67 |

Pada sasaran berkembangnya sektor pariwisata terdiri dari 2 (dua) indikator. Indikator pertama adalah jumlah kunjungan wisatawan dengan target tahun 2021 adalah 353.020, realisasi target 2021 sebesar 642.114, sehingga capaian sebesar 181,89%.

### 1) Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.54
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

| SASARAN STRATEGIS | PROGRAM | ANGGARAN | | | CAPAIAN KINERJA | TINGKAT EFISIENSI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TARGET (Rp) | REALISASI (Rp) | % | | |
| Berkembangnya Sektor Pariwisata | Peningkatan daya Tarik destinasi pariwisata | 1.314.860.987 | 1.312.385.396 | 99,81 | 178,67 | |
| | Pemasaran pariwisata | 872.958.480 | 771.107.286 | 88,33 | | |
| | Pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif | 886.627.880 | 853.519.400 | 96,27 | | |
| **Rata-rata** | | | | **94,8** | 178,67 | **83,87** |

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 94,8 % dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 178,67 %, maka dapat diperoleh tingkat efisiensi pelaksanaan pencapaian sasaran sebesar

83,87%. Dengan hasil tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa proses pencapaian kinerja pada sasaran ini telah dilaksanakan dengan efisien.

**2) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Dalam mencapai sasaran strategis berkembangnya sektor pariwista didukung dengan mengerahkan sumber daya keuangan melalui program sebagai berikut:

a. Program peningkatan daya Tarik destinasi pariwisata dengan capaian 100% melalui kegiatan/sub kegiatan :
   1. Pengembangan destinasi pariwisata kabupaten/kota capaian 100%.
   2. Monitoring dan evaluasi pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota capaian 100%.

b. Program pemasaran pariwisata capaian 100% yang dilaksanakan melalui kegiatan pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya Tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota dengan melalui kegiatan/sub kegiatan:
   1. Penguatan promo mellaui media cetak, elektronik, dan media lainnya baik dalam negeri dan luar negeri capaian 100%.
   2. Fasilitasi kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negeri pariwisata kabupaten/kota capaian 100%.

c. Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif dengan capaian 100%, yang dilaksanakan melalui kegiatan pelaksanaan peningkatan sumber daya manusia pariwista dan ekonomi kreatif tingkat dasar, dengan kegiatan/sub kegiatan:
   1. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata capaian 100%.
   2. Monitoring dan evaluasi pengembangan sumber daya pariwista dan ekonomi kreatif capaian 100%.

**b. Perbandingan antara Realisasi Kinerja selama 3 Tahun dan Target Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2022**

Tabel 3.55
Perbandingan Realisasi Kinerja 2019, 2020, 2021 dan Target Akhir 2022

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TAHUN | | | TARGET RPJMD |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | |
| Berkembangnya Sektor Pariwisata | Jumlah Kunjungan Wisatawan | 722.932 | 529,647 | 642.114 | 370.671 |
| | Rata-rata Lama Tinggal | 1,14 | 0.33 | 2 | 1,14 |

Jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Singkawang Tahun 2021 menunjukan peningkatan dari Tahun 2020 meskipun tidak sebaik jumlah kunjungan tahun 2019. Hal ini sangat dipengaruhi oleh situasi pandemic covid yang terjadi pada sepanjang tahun 2021. Untuk indikator rata-rata lama tinggal wisatawan untuk menetap di Kota Singkawang belum menunjukan lama tinggal 2 hari.

**c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan**

Indikator jumlah kunjungan wisata dan rata-rata lama tinggal telah memenuhi bahkan melebihi dari target yang telah ditetapkan. Hal ini sangat dipengaruhi oleh:

a. Melakukan promosi melaui pembuatan video tentang wisata Kota Singkawang secara lebih baik dan memplukisasikan dalam website Pemerintah Kota Singkawang dan media sosial serta kanal termasuk memberdayakan pemuda yang bergerak dalam kontens promosi.
b. Pemerintah Kota Singkawang selalu berhias diri pada setiap event keagamaan sebagai bentuk wujud sebagai Kota Toleransi dengan tujuan meningkatkan daya tarik wisata.
c. Melakukan pengembangan dan perbaikan sarana pendukung pada destinasi pariwista antara lain pembuatan gazebo, tempat parkir, jalan menuju lokasi wisata, penerangan atau lampu hias dilokasi wisata dan taman kota serta perbaikan taman-taman kota yang menjadi tempat wisata dan olah raga.
d. Singkawang sebagai salah satu Kota Wisata di Propinsi Kalimnatan Barat, menjadi tujuan kunjungan utama dari wisatawan lokal Propinsi Kalimantan Barat. Pandemi covid 19 yang telah dialamai cukup lama, membuat masyarakat Kalimantan Barat mengurangi

wisata keluar propinsi, dan Kota Singkawang menjadi salah satu tujuan utama wisata.

Meskipun telah melebihi target yang ditetapkan, dalam memenuhi sasaran berkembangnya sektor pariwisata, masih banyak terdapat hambatan antara lain:

a. Belum maksimalnya Pemerintah Kota Singkawang dalam mewujudkan Singkawang sebagai Kota Pariwista di Kalimantan Barat.
b. Masih lemahnya sinergisitas antara Pemerintah Kota dengan pelaku pariwsata.
c. Belum adanya regulasi kebijakan terkait tarif batas atas dan batas bawah untuk hotel dan penginapan.

## B. REALISASI ANGGARAN

Kerangka pendanaan yang digunakan dalam pembangunan adalah analisis pengelolaan keuangan daerah untuk menentukan sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber danadan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya mencapai visi dan misi serta target pembangunan nasional.

### 1. Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan unsur penting dalam struktur APBD, karena besaran pendapatan akan menentukan kemampuan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan. Kebijakan pendapatan daerah diarahkan pada optimalisasi sumber-sumber pendapatan yang selama ini menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta tetap berupaya melakukan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan baru dengan memanfaatkan potensi lokal yang ada di wilayah Kota Singkawang. Adapun realisasi penerimaan pendapatan daerah Kota Singkawang adalah sebagai berikut:

Tabel 3.56
Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah TA 2021

| KODE REK | URAIAN | JUMLAH ANGGARAN | REALISASI | % |
|---|---|---|---|---|
| **4** | **PENDAPATAN** | | | |
| **4.1** | **Pendapatan Asli Daerah (PAD)** | **168.881.218.902** | **175.462.109.825,36** | **103,90** |
| **4.1.1** | Pendapatan pajak daerah | 56.270.000.000,00 | 54.434.652.300,80 | 96,74 |
| **4.1.2** | Pendapatan retribusi daerah | 5.873.000.000 | 4.705.877.645,26 | 80,13 |
| **4.1.3** | Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan | 6.651.000.000 | 6.867.923.037,00 | 103,26 |
| **4.1.4** | Lain-lain PAD yang sah | 100.087.218.902 | 109.453.656.842,30 | 109,36 |
| **4.2** | **Pendapatan Transfer** | **661.330.552.094** | **675.488.406.974,03** | **102,14** |
| **4.2.1** | Transfer Pemerintah Pusat -Dana Perimbangan | 598.425.628.666 | 606.276.727.141,00 | 101,31 |
| **4.2.2** | Pendapatan Transfer Antar Daerah | 62.904.923.428 | 69.211.679.833,03 | 110,37 |
| **4.3** | **Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah** | **31.874.981.098** | 35.687.455.319,00 | 111,96 |
| **4.3.1** | Pendapatan hibah | 25.672.200.000,00 | 29.907.656.494,00 | 116,50 |
| **4.3.3** | Pendapatan Lainnya | 6.202.781.098,00 | 5.779.798.825,00 | - |
| **JUMLAH PENDAPATAN** | | **862.086.752.094** | **886.637.972.118,39** | **102,85** |

*Sumber Data : Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang*

## 2. Pengelolaan Belanja Daerah

Pengelolaan keuangan daerah yang dimulai dari perencanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pengawasan, telah mengalami perubahan yang sangat mendasar. Kapasitas keuangan daerah dalam mendukung pencapaian target pembangunan daerah dapat dilihat dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Keuangan daerah dipergunakan untuk membiayai program dan kegiatan dalam rangka penyelenggaran pemerintahan dan pembangunan yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan tersebut menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan baik dari aspek fisik maupun non fisik. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Singkawang dilakukan dan dirumuskan melalui pendekatan berbasis kinerja yang sangat bermanfaat bagi proses perencanaan pembangunan daerah yang dijabarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Singkawang.

Tabel 3.57

Realisasi Belanja Daerah TA 2021

| KODE REK | URAIAN | JUMLAH ANGGARAN | REALISASI | % |
|---|---|---|---|---|
| **5** | **BELANJA** | **1.150.501.148.309** | **1.053.654.023.067,98** | **91,58** |
| **5.1** | **Belanja Operasi** | **752.273.565.899** | **680.259.223.014,48** | **90,43** |
| **5.1.1** | Belanja pegawai | 426.879.015.990 | 391.236.295.267,50 | 91,65 |
| **5.1.2** | Belanja Barang | 295.578.082.168 | 267.408.110.803,98 | 90,47 |
| **5.1.5** | Belanja Hibah | 25.995.834.961 | 18.462.010.520,00 | 71,02 |
| **5.1.6** | Belanja Bantuan Sosial | 3.820.632.780 | 3.152.806.423,00 | 82,52 |
| **5.2** | **Belanja Modal** | **387.827.582.410** | **366.764.402.831,50** | **94,57** |
| **5.2.1** | Belanja Tanah | 2.145.000.000 | 44.773.000,00 | 2,09 |
| **5.2.2** | Belanja Peralatan dan Mesin | 52.062.755.457 | 50.882.542.056,50 | 97,73 |
| **5.2.3** | Belanja Gedung dan Bangunan | 86.408.726.018 | 78.483.345.284,00 | 90,83 |
| **5.2.4** | Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan | 243.985.315.784 | 234.222.824.631,00 | 96,00 |
| **5.2.5** | Belanja modal Aset Tetap Lainnya | 3.225.785.151 | 3.130.917.860,00 | 97,06 |
| **5.3** | **Belanja Tidak Terduga** | **10.400.000.000** | **6.630.397.222,00** | **63,75** |
| 5.3.1 | Belanja Tidak Terduga | 10.400.000.000 | 6.630.397.222,00 | 63,75 |
| | **SURPLUS/(DEFISIT)** | **(288.414.396.215)** | **(167.016.050.949,59)** | **57,91** |

*Sumber Data : Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang*

## 3. Kondisi Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan yang bertujuan untuk menutupi selisih antara pendapatan dan belanja daerah. Pembiayaan daerah dikelompokkan ke dalam Penerimaan Daerah, Pengeluaran Daerah dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) yang masing-masing mempunyai fungsi untuk meningkatkan pelayanan aparatur dan pelayanan kepada masyarakat dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.58

Realisasi Pembiayaan Daerah TA 2021

| KODE REK | URAIAN | JUMLAH ANGGARAN | REALISASI | % |
|---|---|---|---|---|
| **6.** | **PEMBIAYAAN** | | | |
| **6.1** | **Penerimaan pembiayaan** | **296.414.396.215** | **251.894.263.831,77** | **84,98** |
| **6.1.1** | Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) | 57.448.314.123 | 57.448.314.122,84 | 100 |
| **6.1.4** | Penerimaan Pinjaman Daerah | 238.966.082.092 | 194.445.949.708,93 | 91,37 |
| **JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN** | | **296.414.396.215** | **251.894.263.831,77** | **84,98** |
| **6.2** | **Pengeluaran Pembiayaan** | **8.000.000.000** | **8.000.000.000** | **100** |
| **6.2.2** | Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah | 8.000.000.000 | 8.000.000.000 | 100 |
| **JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN** | | **8.000.000.000** | **8.000.000.000** | **100** |
| **PEMBIAYAAN NETO** | | **288.414.396.215** | **243.894.263.831,77** | **84,56** |
| **Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)** | | | **76.878.212.882,18** | |

*Sumber Data : Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang*

# BAB IV
# PENUTUP

Sebagai penutup dari Laporan Kinerja Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2021 ini, dapat disimpulkan bahwa secara umum Pemerintah Kota Singkawang telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan dalam upaya pencapaian sasaran-sasaran strategis. Berdasarkan hasil analisis pencapaian pengukuran kinerja terhadap 17 (tujuh belas) sasaran strategis dan 33 (tiga puluh empat) Indikator Kinerja Utama, dapat di simpulkan bahwa:

- 15 indikator (45,45 %) dengan capaian kinerja ≥100%.
- 13 indikator (39,39%) dengan capaian kinerja antara 75% - 99,99%.
- 1 indikator (3,03%) dengan capaian kinerja 55,01% - 74,99%
- 1 Indikator (3,03%) dengan capaian kinerja 0% - 55%
- 3 indikator (9,09%) yang belum dapat dihitung capaian kinerjanya karena belum rilis atau ditetapkan oleh instansi penilai.

Memperhatikan hasil capaian indikator pada seluruh sasaran, perlu mendapat perhatian terhadap indikator yang belum mencapai target sesuai target RPJMD mengingat tahun 2022 adalah akhir pelaksanaan RPJMD, sehingga menjadi perhatian bagi Pemerintah Kota Singkawang. Adapun indikator yang perlu menjadi perhatian sebagaimana berikut:

| No | Sasaran/Indikator | Realisasi Tahun 2021 | Target RPJMD 2022 |
|---|---|---|---|
| 1 | Sasaran 3: Meningkatnya daya saing koperasi, UMKM, Industri dan Ekonomi Kreatif | | |
| | 1. Volume Usaha Koperasi | 253.966.051.385 | 304.191.033.500 |
| | 2. Nilai PDRB sektor industri | 1.024.706.390.000 | 1.110.275.874.922 |
| 2 | Sasaran 4 : Meningkatnya investasi daerah | | |
| | Persentase pertumbuhan nilai Realisasi PMDN dan PMA (%) | -26,49 | 25,00 |
| 3 | Sasaran 5 : Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka dan kemiskinan | | |
| | 1. Angka Tingkat Pengangguran Terbuka | 9,16 | 6,85 |
| | 2. Angka kemiskinan | 4,83 | 4,6 |

| No | Sasaran/Indikator | Realisasi Tahun 2021 | Target RPJMD 2022 |
|---|---|---|---|
| 4 | Sasaran 6 : Meningkatnya produksi Pertanian dan perikanan yang berkontribusi terhadap perekonomian daerah | | |
| | Nilai PDRB Sektor perikanan (%) | 1,99 | 2,16 |
| 5 | Sasaran 8 : Meningkatnya kualitas sumber daya air, udara dan tutupan lahan | | |
| | 1. Indeks Kualitas Air | 80 | 81 |
| | 2. Indeks tutupan lahan | 33,8 | 36,53 |
| 6 | Sasaran 10 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan | | |
| | Nilai SAKIP | B | BB |
| 7 | Sasaran 13 : Meningkatnya kualitas pendidikan | | |
| | Angka Rata- rata lama sekolah (tahun) | 7,9 | 8,12 |
| 8 | Sasaran 14 : Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar | | |
| | 1. Persentase Jalan mantap (%) | 58,67 | 62,30 |
| | 2. Persentase rumah layak huni (%) | 91,42 | 92.25 |
| | 3. Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang ditangani (%) | 52,2 | 85,67 |
| 9 | Sasaran 16 : Meningkatnya daya saing sektor perdagangan | | |
| | volume usaha perdagangan | 1.547.104.200.000 | 1.702.787.098.524,75 |

Pencapaian kinerja yang telah terlaksana dengan baik maupun yang belum sepenuhnya tercapai, memberikan pengalaman kepada jajaran Pemerintah Kota Singkawang untuk terus berupaya meningkatkan kinerjanya dalam mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kota Singkawang.

Oleh karena itu, sesuai dengan hasil analisis capaian kinerja Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2021, dapat dirumuskan beberapa langkah penting dan strategis sebagai solusi bagi masalah yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam rangka peningkatan dan penyempurnaan kinerja yang lebih baik, sebagai berikut :

1. Melakukan monitoring dan evaluasi serta perbaikan secara berkala atas kinerja dan sistem kerja agar dapat dilakukan upaya perbaikan kinerja yang masih belum optimal serta sebagai bahan pertimbangan perencanaan pembangunan di masa mendatang;

2. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan agar dapat mencapai tujuan dan sasaran kinerja guna menwujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan;
3. Melakukan koordinasi dan konsolidasi organisasi secara internal dalam rangka meningkatkan komitmen jajaran aparatur Pemerintah Kota Singkawang terhadapa penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam pelaksanaan pembangunan;
4. Mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya manusia yang ada sebagai motor penggerak dan pelaku pembangunan sekaligus pelayan publik; dan
5. Membuat kebijakan motivasi kerja dan kinerja berupa *reward and punishment* terhadap pelaksanaan dan pencapaian kinerja.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2021. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat sebagaimana yang diharapkan.

Singkawang, 30 Maret 2022
Wali Kota Singkawang,

**TJHAI CHUI MIE, S.E, M.H**

**PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG**
**INSPEKTORAT DAERAH**
Jalan Alianyang Nomor 1 Singkawang 79123
Telepon. (0562) 631767 Faks. (0562) 631767
Email: inspektorat@singkawangkota.go.id Website: www. singkawangkota.go.id

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU**

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**

**KOTA SINGKAWANG**

**TAHUN ANGGARAN 2021**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Singkawang untuk Tahun Anggaran 2021 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Subtansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab Manajemen Pemerintah Kota Singkawang.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi dan hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan didalam Laporan Kinerja ini.

Singkawang, 30 Maret 2022

**INSPEKTUR,**

**SITI KODAM MARIANA, S,IP., M,Si.**
Pembina Utama Muda
NIP. 19670717 198803 1 010

# LAPORAN KINERJA PEMERINTAHAN KOTA SINGKAWANG

2021

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

SINGKAWANG HEBAT!